



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2024



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan yang baik ini pula saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LPPD Tahun 2024. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, memberikan tantangan serta peluang bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi salah satu dari 20 kota global terbaik di dunia (*Top 20 Global City*) pada 2045. Inovasi-inovasi diciptakan untuk memberi dampak positif bagi masyarakat, guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Bentang Harapan JakASA, gerakan kolaboratif yang mengundang semua pihak untuk bersama-sama menciptakan gambaran masa depan Jakarta yang lebih baik.

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu laporan ini juga mengakomodir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini, dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka menuju Provinsi DKI Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Februari 2025

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 25 April 2024 telah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengatur tentang kekhususan Jakarta bukan lagi berdasarkan ibu kota negara namun sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global yang menjadi jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia. Selanjutnya pada 30 November 2024 terbit revisi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun pada pelaksanaannya, Undang-Undang 2 Tahun 2024 dan Undang-Undang 151 Tahun 2024 mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, dengan demikian dasar hukum pembentukan daerah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

b. Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

1) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 5⁰ 19' 12" Lintang Selatan - 6⁰ 23' 54" Lintang Selatan dan 106⁰ 22' 42" Bujur

Timur - 106⁰ 58' 18" Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 7 meter di atas permukaan laut.

Secara geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah 7.660 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.998 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, dan 2 kanal yang berbatasan dengan Laut Jawa.

Gambar I-1
Sungai, Kanal dan *Flood Way*
yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2024

Letak geografis di wilayah Utara sebagai muara 13 sungai yang melintas di Jakarta, menyebabkan Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob).

Sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

2) Iklim

Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Kemayoran di Tahun 2024 tertinggi di bulan Mei ($36,6^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan Juli & September ($23,6^{\circ}\text{C}$). Curah hujan tertinggi di bulan September ($43,12\text{mm}$) dan terendah di bulan Agustus ($3,8\text{mm}^2$). Sedangkan temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di Tahun 2024 tertinggi di bulan Oktober ($36,8^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan September ($22,8^{\circ}\text{C}$). Curah hujan tertinggi di bulan Juli ($34,13\text{mm}^2$) dan terendah di bulan Agustus ($1,15\text{mm}^2$).

Selengkapnya suhu maksimum, minimum dan rata-rata di Jakarta selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-1
Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	24,00	27,78	35,40	24,20	28,67	35,20
Februari	24,40	28,54	27,00	28,80	28,85	33,60
Maret	24,00	28,65	35,40	23,80	28,96	35,60
April	25,20	29,63	35,00	25,00	29,92	34,40
Mei	26,00	30,36	36,60	26,20	30,57	33,80
Juni	24,20	29,50	35,60	25,50	29,50	31,80
Juli	23,60	28,46	34,60	23,40	28,63	33,60
Agustus	24,80	29,05	35,20	23,80	29,28	34,60
September	23,60	29,17	35,40	22,80	29,38	35,40
Oktober	25,00	30,09	36,40	24,60	30,16	36,80
November	25,00	29,23	35,20	26,60	29,59	35,40
Desember	24,40	28,45	35,40	23,80	28,40	35,40

Sumber : <https://dataonline.bmkg.go.id> (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok), 2024

Selengkapnya curah hujan di Jakarta selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I-2
Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2024

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
Januari	18,32	17	2,78	24,95	16	3,9
Februari	27,80	18	3,58	27,15	18	4,96
Maret	15,41	19	3,24	14,07	18	4,36

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
April	9,29	13	3,79	13,59	13	5,48
Mei	11,36	3	4,33	4,50	2	5,91
Juni	18,25	6	4,05	24,8	6	6,11
Juli	19,68	7	4,99	34,13	3	6,54
Agustus	3,80	2	5,92	1,15	1	7,31
September	43,12	4	6,25	25,93	3	7,10
Oktober	15,35	4	6,03	15,71	6	7,10
November	13,67	11	3,94	7,5	8	5,43
Desember	15,39	22	1,74	11,75	21	3,02

Sumber : <https://dataonline.bmkg.go.id> (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok), 2024

Dari data di atas diketahui bahwa rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun 2024 sebesar 29,2° C dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum sebesar 34,7° C dan 24,69° C. Suhu terendah di Jakarta selama tahun 2024 terjadi di bulan September tidak rata-sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut, frekuensi hujan paling banyak di bulan Desember.

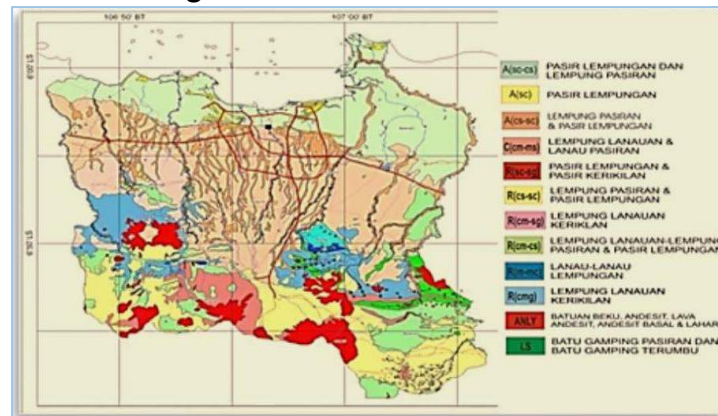
3) Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleistosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aluvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 meter, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 meter, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter.

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai

sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut.

Gambar I-2
Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024

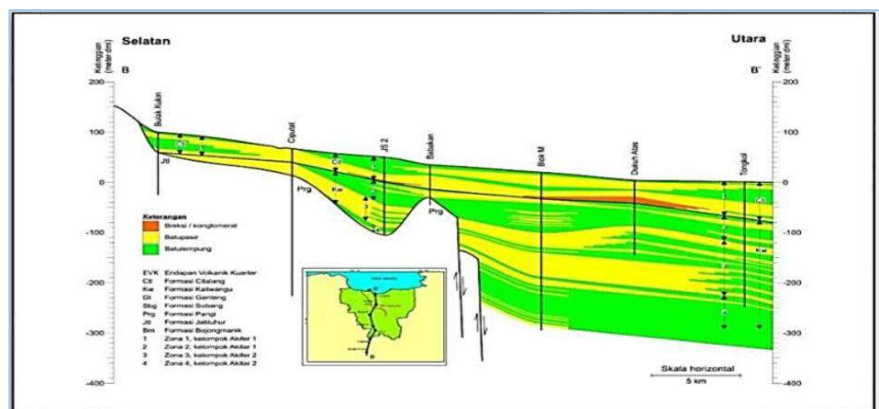
Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tanggul- tanggul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut. Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut:

- Pasir lempungan dan lempung pasir, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasir dan lempung pasir. Semakin ke arah Utara mendekati pantai berupa lanau pasir dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 meter dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 300 meter.
- Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-seling lanau pasir dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter.
- Satuan Lempung Pasir dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limbah banjir sungai. Satuan ini

tersusun berselang-selang antara lempung pasir dan pasir lempungan.

- d) Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasir dengan tebal lapisan antara 3-13, 5 meter.
- e) Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuartar yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 meter dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 meter. Formasi ini didominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

Gambar I-3
Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta



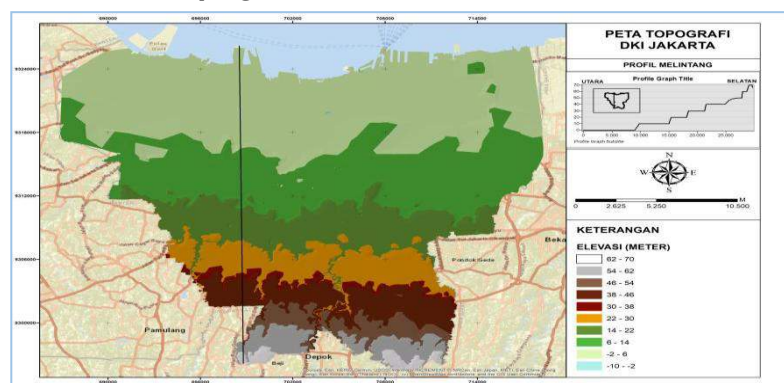
Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2011-2030

Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh 13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadane. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi

pengendapan yang lebih banyak dari sungai lainnya. Keadaan ini menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbentuk delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan sedimennya tinggi lebih cepat dari pada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan) meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial, maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah daratan. Hempasan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.

Gambar I-4
Topografi di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024

Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang, menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banjir.

c. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2024 jumlah penduduk provinsi DKI Jakarta mencapai 11.135.191 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebanyak 5.579.005 jiwa atau 50,10 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.556.186 jiwa atau 49,90 persen. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I-3
Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	5.334.781	5.362.748	5.375.869	5.371.646	5.579.005
Perempuan	5.227.307	5.282.028	5.304.082	5.300.454	5.556.186
Jumlah	10.562.088	10.644.776	10.679.951	10.672.100	11.135.191
Pertumbuhan	0,92	0,57	0,66	0,38	0,31
Densitas (Ribuan jiwa/ km ²)	15.907	15.978	16.084	16.146	16.165
Sex Ratio	102,06	101,53	101,53	101,34	101,1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar 0,31 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan kepadatan penduduk sebesar 16.165 jiwa/km².

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, memiliki status khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan berada pada level Provinsi.

Gambar I-5
Peta Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 (lima) kotamadya menjadi 1 (satu) kabupaten administrasi dan 5 (satu) kota administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi, yakni kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km², Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km², Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km², Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km² dan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km².

Pada pelayanan di kecamatan dan kelurahan, untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pada Tahun 2024, jumlah RW dan RT pun mengalami perubahan sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel I-4
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga,
Rukun Tetangga dan Lembaga Musyawarah Kelurahan
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Kota/ Kabupaten Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	386	4.531	385
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	460	5.315	449
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	587	6.529	583
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.056	569
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	712	7.953	708
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127	24
	Jumlah	662,33	44	267	2.748	30.511	2,718

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara memiliki kewenangan khusus kelembagaan Perangkat Daerah. Selain itu, Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan bersifat administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 42 Perangkat Daerah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 63.857 orang ASN dan 80.529 orang non ASN, lebih jelasnya dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel I-5
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No.	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	27.090	36.767	63.857
2.	Non ASN	69.186	11.343	80.529
	Total	96.276	48.110	144.386

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

APBD Provinsi DKI Jakarta untuk di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 81.716.573.026.059,- yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Kemudian, pada fase Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan total APBD menjadi Rp. 85.202.328.591.676,-

APBD ini disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 periode sampai dengan 31 Desember 2024 (unreview):

Tabel I-6
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Akun	Nama Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (unreviewed) (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2023 (audited)
PENDAPATAN DAERAH					
	Pendapatan Asli Daerah				
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.980.000.000.000	44.443.828.426.232	98,81	43.516.481.672.833
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	647.749.998.376	713.837.027.996	110,20	454.697.560.911
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	634.395.407.063	653.700.898.761	103,04	545.869.249.987
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.204.598.994.964	4.925.765.703.879	117,15	4.622.697.231.503
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.466.744.400.403	50.737.132.056.868	100,54	49.139.745.715.234
	Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat				
5.1.1.2.1	Dana Perimbangan	23.732.336.589.863	21.576.815.024.381	90,92	20.124.459.645.034
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	20.089.713.629.863	18.032.588.917.639	89,76	17.049.968.580.672
5.1.1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	368.377.412.000	368.173.270.201	~	22.179.718.000
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	0,00	3.076.020.400
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.176.052.836.541	97,00	3.049.235.325.962
5.1.1.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0,00	0
5.1.1.2.3	Dana Insentif Fiskal	44.090.217.000	44.090.217.000	100,00	35.175.027.000
	Total Pendapatan Transfer	23.776.426.806.863	21.620.905.241.381	90,93	20.159.634.672.034
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
5.1.1.3	Pendapatan Hibah	703.654.652.623	589.167.782.024	83,73	1.766.153.820.454
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	703.654.652.623	589.167.782.024	83,73	1.766.153.820.454
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	74.946.825.859.889	72.947.205.080.273	97,33	71.065.534.207.722

Akun	Nama Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (unreviewed) (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2023 (audited)
BELANJA DAERAH					
	Belanja Operasional				
5.1.2.1.1.1.a	Belanja Pegawai	20.031.780.182.216	19.190.554.701.043	95,80	17.977.776.327.870
5.1.2.1.1.1.b	Belanja Barang dan Jasa	27.835.321.117.883	26.572.378.066.555	95,46	25.824.444.605.296
5.1.2.1.1.1.c	Belanja Bunga	186.000.000.000	180.738.864.995	97,17	229.704.491.741
5.1.2.1.1.1.d	Belanja Subsidi	6.320.798.085.601	5.875.837.590.937	92,96	5.539.653.281.534
5.1.2.1.1.1.e	Belanja Hibah	3.358.144.887.494	3.307.808.095.906	98,50	3.621.682.896.507
5.1.2.1.1.1.f	Belanja Bantuan Sosial	3.551.461.654.483	3.496.629.048.637	98,46	4.363.641.476.668
	Jumlah Belanja Operasional	61.283.505.927.677	58.623.946.368.073	95,66	57.556.903.079.616
	Belanja Modal				
5.1.2.1.1.2.a	Belanja Tanah	763.402.783.015	433.525.287.650	56,79	442.600.308.470
5.1.2.1.1.2.b	Belanja Peralatan dan Mesin	3.169.221.270.721	2.961.717.289.383	93,45	2.822.976.130.249
5.1.2.1.1.2.c	Belanja Gedung dan Bangunan	3.441.760.532.962	2.384.316.870.176	69,28	1.653.055.663.410
5.1.2.1.1.2.d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.352.974.561.800	4.974.322.344.363	92,93	3.799.027.573.476
5.1.2.1.1.2.e	Belanja Aset Tetap Lainnya	128.157.171.217	119.496.671.697	93,24	139.600.392.693
5.1.2.1.1.2.f	Belanja Aset Lainnya	133.539.507.754	129.085.346.240	96,66	0
	Jumlah Belanja Modal	12.989.055.827.469	11.002.463.809.509	84,71	8.857.260.068.298
	Belanja Tak Terduga				
5.1.2.1.1.3	Belanja Tak Terduga	1.365.518.170.267	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Tak Terduga	1.365.518.170.267	0	0,00	0
	Transfer Transfer / Bantuan Keuangan	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
5.1.2.1.1.4	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
	Jumlah Transfer	385.033.285.520	383.997.067.520	99,73	356.446.480.500
	Jumlah Belanja dan Transfer	76.023.113.210.933	70.010.407.245.102	92,09	66.770.609.628.414
	Surplus / Defisit	(1.076.287.351.044)	2.936.797.835.171		4.294.924.579.308

Akun	Nama Akun	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (unreviewed) (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2023 (audited)
PEMBIAYAAN DAERAH					
	Penerimaan Pembiayaan				
5.1.3.1.1	Penggunaan SiLPA	6.542.421.120.069	6.542.421.120.069	100,00	8.600.096.664.254
5.1.3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.713.081.611.718	2.801.304.537.758	75,44	286.277.630.136
5.1.3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	71.846.300	~	190.589.666
	Jumlah Penerimaan	10.255.502.731.787	9.343.797.504.127	91,11	8.886.564.884.056
	Pengeluaran Pembiayaan				
5.1.3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.317.545.546.679	5.988.136.019.949	81,83	4.836.397.306.901
5.1.3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.185.106.399	99,97	1.802.671.036.394
5.1.3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	0	0	~	0
	Jumlah Pengeluaran	9.179.215.380.743	7.849.321.126.348	85,51	6.639.068.343.295
	Pembiayaan Neto	1.076.287.351.044	1.494.476.377.779		2.247.496.540.761
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		4.431.274.212.950		6.542.421.120.069

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2024

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi permasalahan strategis pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, serta kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan/ kesenjangan (*gap*) antara pencapaian kinerja pembangunan dan target yang direncanakan serta antara kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Permasalahan pembangunan dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ SDGs/ Standar Nasional/ Target Tahunan Dalam RPJMD/ Capaian Tahun Sebelumnya/ Tren).

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang biasanya dihadapi oleh suatu negara atau daerah. Permasalahan tingkat pengangguran yang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan juga social seperti kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta secara signifikan pada saat pandemi Covid-19, yaitu mencapai 8,98 persen per Agustus 2020 atau sebanyak ±572.000 orang menganggur. Selain perlambatan pertumbuhan ekonomi, TPT di masa pandemi dapat terjadi akibat pemutusan hubungan kerja, pendidikan yang minim dan/atau keterampilan pencari kerja yang minim.

Angka TPT DKI Jakarta pada Agustus 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 6,21 persen dengan TPT laki-laki sebesar 6,23 persen dan perempuan sebesar 6,17 persen. Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan SMA kejuruan

merupakan yang paling tinggi (8,47 persen) sedangkan TPT tamatan SMP menjadi yang paling rendah (4,15 persen). Capaian TPT DKI Jakarta per Agustus 2024 masih jauh lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi pada 2019 yang telah mencapai 5,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu terus mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran terbuka dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia.

Gambar I-6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Provinsi DKI Jakarta juga masih menghadapi masalah ketimpangan yang ditunjukkan oleh koefisien Rasio Gini dimana ketimpangan pendapatan masyarakat DKI Jakarta mengalami tren peningkatan sejak 2020 sampai 2024 yakni mencapai 0,399 di Maret 2020 menjadi 0,431 di September 2024. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program, di antaranya: Penjualan sembako murah, Penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu, Subsidi transportasi umum, Pemberdayaan masyarakat melalui

Jakarta Entrepreneur, dan Pelaksanaan program pengaman jaring sosial. Rasio Gini DKI Jakarta masih berada di atas angka nasional yaitu sebesar 0,381 pada September 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan kesejahteraan masyarakat kelas atas dan kelas bawah di DKI Jakarta lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Gambar I-7
Tren Rasio Gini
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan tren tahun 2017-2024, Rasio Gini DKI Jakarta terlihat semakin melebar sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Di sisi lain, Rasio Gini nasional mengalami tren rata-rata yang relatif stabil. Pertumbuhan pusat ekonomi dan bisnis di Jakarta sangat berdampak pada ketidaksetaraan pendapatan masyarakat dimana di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, namun di sisi lain dapat memperlebar *gap* akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah masih perlu mengupayakan redistribusi pendapatan seperti melalui program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta, salah satunya kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal ini terlihat pada Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta per Maret 2020 sebesar 4,53 persen

dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 dengan naik menjadi 4,72 persen. Angka tersebut mengalami penurunan pada Maret 2023 menjadi 4,44 persen, namun kondisi ini masih terpaut jauh dari pencapaian penurunan Tingkat Kemiskinan pada masa pra pandemi, yakni telah berhasil mencapai 3,47 persen pada Maret 2019.

Gambar I-8
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Garis kemiskinan Jakarta, yaitu jumlah pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan oleh penduduk Jakarta, sebesar Rp.792.515,- per kapita per bulan (2023) dan meningkat menjadi Rp.846.085,- per kapita per bulan (2024). Sementara itu, Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta sebagai acuan kebutuhan layak telah mencapai sekitar ±Rp.5.000.000,- per bulan. Jika garis kemiskinan dan UMR Jakarta dibandingkan, maka pengeluaran minimum penduduk Jakarta masih jauh di bawah standar. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jakarta yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta keterbatasan dalam mencari lapangan pekerjaan. Jika dibiarkan berlanjut, maka hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Jakarta.

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan dan IPM saling berkaitan satu sama lain dimana semakin tinggi IPM suatu wilayah, maka

semakin rendah tingkat kemiskinannya karena IPM yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang baik, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Sebaliknya, wilayah dengan IPM rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

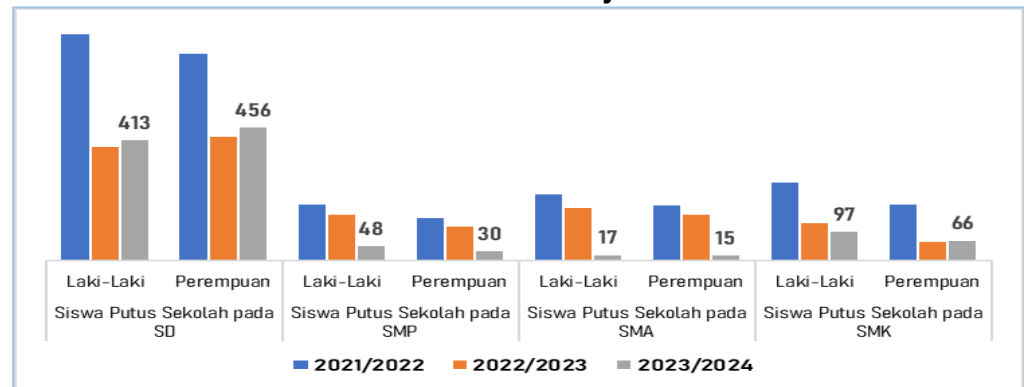
IPM di wilayah kota administrasi di DKI Jakarta telah berstatus “sangat tinggi”, yakni Jakarta Selatan sebesar 87,57; Jakarta Timur sebesar 84,76; Jakarta Barat sebesar 84,40; Jakarta Pusat sebesar 83,75; dan Jakarta Utara sebesar 82,13. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu masih berada pada status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dengan nilai sebesar 76,69. IPM merupakan angka rata-rata di setiap wilayah sehingga masih terdapat kemungkinan adanya kantong-kantong kemiskinan di wilayah kota/kabupaten administratif yang belum tercermin dalam angka IPM yang tinggi.

2. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan yang masih menghadapi permasalahan, antara lain di bidang layanan pendidikan dimana jumlah siswa putus sekolah masih cukup tinggi seiring dengan masih kurangnya partisipasi murni di jenjang SMP dan SMA. Gambar 4 menunjukkan bahwa tren putus sekolah tertinggi pada seluruh jenjang terjadi pada tahun ajaran 2021/2022 dengan jumlah siswa putus sekolah paling banyak pada jenjang SD/MI.

Peningkatan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tersebut membawa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2023/2024, angka putus sekolah secara umum mengalami penurunan di semua jenjang Pendidikan, kecuali pada jenjang SD yang justru mengalami peningkatan sehingga masih menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan akses dan retensi Pendidikan.

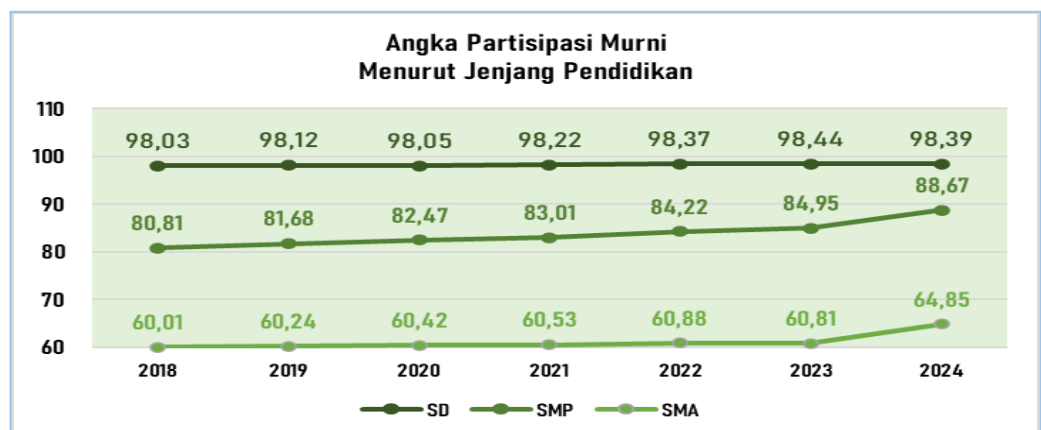
Gambar I-9
Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun Ajaran 2021/2022 - 2023/2024



Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diolah 2025

Tren Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD hingga SMA/SMK/MA tahun 2018-2024 menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Seperti pada 2024, APM jenjang SD, SMP, dan SMA secara berurutan sebesar 98,39; 88,67; dan 64,85 atau menunjukkan partisipasi yang terus menurun. Namun demikian, APM di setiap jenjang pendidikan memiliki tren yang membaik dari tahun 2018-2024. APM jenjang SMA tahun 2024 meningkat 4,04 poin yakni dari 60,81 di 2023 menjadi 64,85 di 2024. APM jenjang SMP tahun 2024 mencapai 88,67 dari 84,95 di tahun 2023 atau meningkat 3,72 poin. Sementara itu, APM jenjang SD tahun 2024 mengalami penurunan 0,05 poin dari 98,44 di 2023 menjadi 98,39.

Gambar I-10
Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2018-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

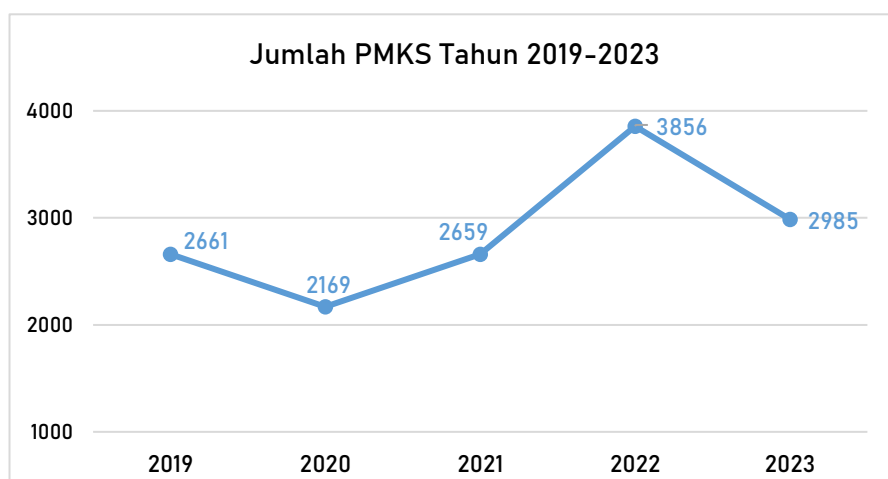
Masalah pendidikan juga terjadi dari sisi penyediaan pendidikan seperti masih belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan. Tenaga pendidik juga masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas guru, serta masih rendahnya persentase guru bersertifikasi dibandingkan dengan jumlah guru keseluruhan pada suatu jenjang pendidikan. Selain itu, terdapat tantangan berupa belum optimal dan memadainya utilisasi serta modernisasi TIK untuk mendukung penguatan sistem dan proses pembelajaran jarak jauh di setiap satuan pendidikan. Pengembangan fitur-fitur pembelajaran daring yang menarik minat serta mudah dicerna oleh para siswa dari setiap mata pelajaran yang diajarkan juga masih perlu ditingkatkan.

Masalah lain pada aspek pelayanan umum adalah masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar perkotaan. Persentase rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian yang layak huni dan terjangkau hanya sebesar 38,8 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Banjir juga masih menjadi persoalan karena tingginya alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, serta dampak dari perubahan iklim. Selain itu, cakupan layanan air limbah masih rendah dan pencemaran lingkungan yang tinggi, ditunjukkan melalui rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian tahun 2023 sebesar 58,69 dari nilai maksimal 100.

Pada urusan sosial, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah PMKS pada tahun 2022 sebanyak 3.856 orang, meningkat sebanyak 1.197 orang dibandingkan tahun 2021. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.985 orang.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial memerlukan perhatian terhadap sarana sosial di antaranya panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, panti rehabilitasi, dan fasilitas sejenis lainnya. Pada tahun 2019 hingga 2023, jumlah sarana sosial mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan jumlah sarana sosial di tahun 2020, namun kembali berkurang sebanyak 12 sarana sosial di tahun 2023 sehingga menjadi 22 sarana. Namun demikian, kapasitas sarana sosial tersebut mengalami peningkatan dari 7.326 orang menjadi 7.751 orang.

Gambar I-11
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019-2023

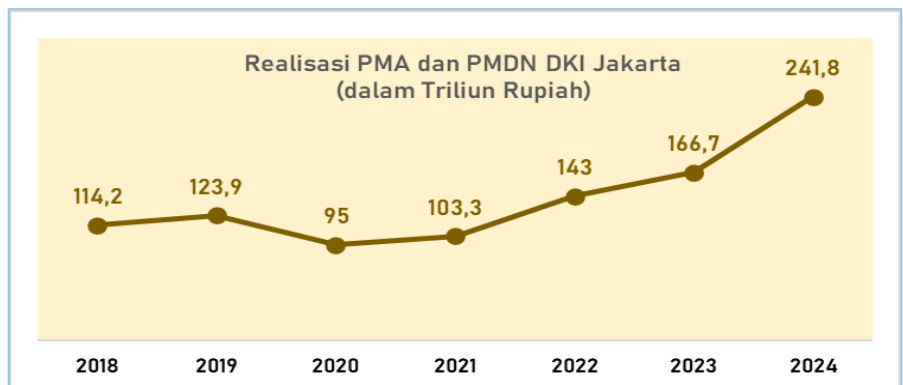


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024

3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi aspek penting dalam pengukuran tingkat produktivitas Provinsi DKI Jakarta. Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap realisasi investasi tahun 2020 dimana terjadi penurunan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.123,90 triliun jadi Rp.95,00 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi investasi meningkat perlahan hingga dapat mencapai Rp.241,8 triliun pada tahun 2024. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui realisasi investasi sebelum masa pandemi.

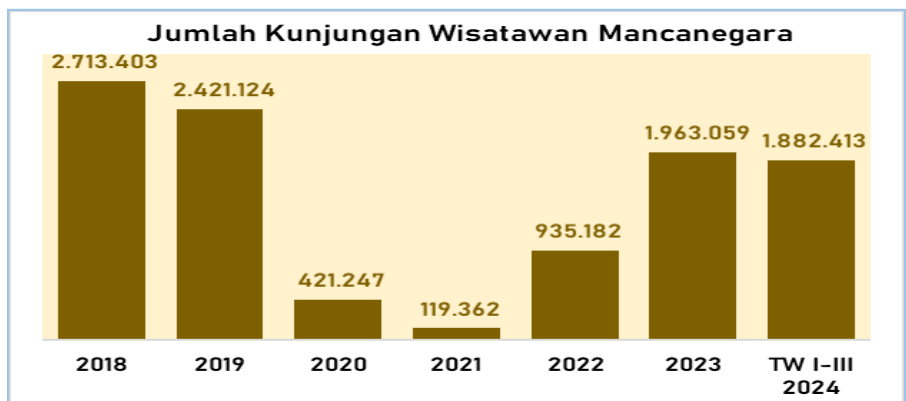
Gambar I-12
Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal
Tahun 2018-2024



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2025

Salah satu sektor unggulan Jakarta adalah pariwisata, namun sektor ini masih menghadapi persoalan berupa penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemi Covid-19. Pada 2020, kunjungan wisatawan mancanegara menurun signifikan sebesar 84,48 persen atau dari 2.713.403 kunjungan di 2018 menjadi hanya 421.247 kunjungan. Jumlah wisatawan mancanegara semakin berkurang pada 2021 dengan hanya sebesar 119.362 kunjungan. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mulai meningkat dan akhirnya dapat mencapai angka 1.882.413 kunjungan pada triwulan III 2024. Namun demikian, angka ini masih belum mencapai jumlah kunjungan seperti pada masa sebelum pandemi Covid-19.

Gambar I-13
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2018-2024

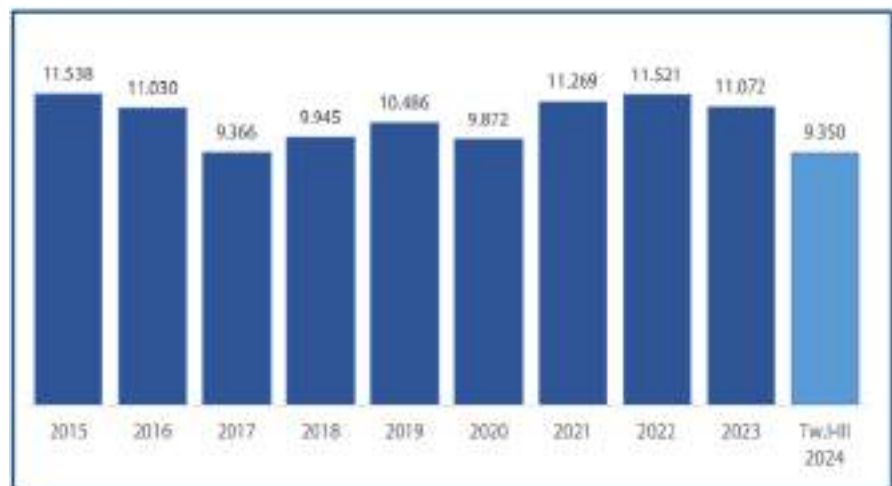


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada saat pandemi Covid-19, kekuatan ekonomi melalui UMKM menjadi alternatif potensial. Akan tetapi, fluktuasi produktivitas UMKM menjadi persoalan tersendiri dimana kondisi kapasitas produksi UMKM di Provinsi DKI Jakarta secara umum cenderung mengalami stagnasi. Pada 2022, nilai ekspor mencapai USD11.521 juta, mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD11.269 juta. Namun, nilai ekspor ini mengalami penurunan menjadi USD11.072 juta pada 2023.

Pada triwulan I hingga III 2024, nilai ekspor mencapai USD9.350 juta. Secara kumulatif, nilai ekspor tersebut tumbuh 14,82 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Gambar I-14
Jumlah Nilai Ekspor Produk
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perumusan isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026. Selain itu, perumusan isu strategis turut mempertimbangkan prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025; kebijakan dalam RTRW 2030; Agenda Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Projects dalam RPJMN 2020-2024; kebijakan dalam RPJMD Prov/Kab/Kota penyangga; hasil evaluasi capaian SDGs; serta isu-isu aktual di antaranya pandemi

Covid-19 dan Undang-Undang Ibukota Negara. Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, dirumuskan 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026 yaitu:

- 1) Ketahanan Terhadap Bencana;
- 2) Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik;
- 3) Ketahanan Ekonomi Inklusif;
- 4) Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas;
- 5) Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara; dan
- 6) Pemerataan Pembangunan.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode transisi hingga dilantiknya Kepala Daerah baru yang terpilih melalui Pilkada serentak 2024. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun periode 2023-2026 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, arahan Agenda pada Pembangunan RPJMN 2020-2024, kesinambungan pembangunan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, serta 6 (enam) isu strategis 2023-2026 yang telah dijabarkan sebelumnya, teridentifikasi 4 (empat) dimensi pembangunan yang selanjutnya dijadikan fokus perencanaan dalam RPD 2023-2026, yaitu: (1) dimensi lingkungan-bangun (*built environment*); (2)

dimensi perekonomian (*economic*); (3) dimensi manusia (*human*); dan (4) dimensi pemerintahan (*governance*). Keempat dimensi ini menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut, masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Tujuan dari dimensi lingkungan-bangun (*built environment*) memiliki indikator Indeks Kota Layak Huni (*Most Livable City Index*) yang disurvei oleh IAP Indonesia. Adapun frase dan kata kunci dari tujuan pertama yaitu '*Regenerasi Kota*', '*Ketahanan*', dan '*Berkelanjutan*'. Regenerasi kota merupakan upaya pembangunan atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran yaitu terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas, dan tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Kedua sasaran tersebut dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan perkotaan yang memadai dengan infrastruktur terkait mobilitas mendapatkan *highlight* utama sehingga diangkat menjadi sasaran tersendiri.

Kata kunci selanjutnya adalah ketahanan yang dimaksudkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip *resilient city*. Kata kunci berikutnya yaitu berkelanjutan yang mewakili

harapan bahwa seluruh pembangunan di DKI Jakarta akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Untuk menjamin hal tersebut, maka dirumuskan sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Sasaran-sasaran pembangunan daerah telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I-7
Indikator dan Sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

2. Tujuan 2: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Tujuan dari dimensi perekonomian (*economic*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang diukur oleh Bappenas. Frase dan kata kunci dari tujuan kedua ini yaitu '*Perekonomian Inklusif*', '*Daya Saing*', '*Penghidupan Layak*' dan '*Pemerataan Kesejahteraan*'. Perekonomian Inklusif merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

Kata kunci selanjutnya yaitu Daya Saing, mengadopsi *Global Competitiveness Index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta yang bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi. Kata kunci berikutnya terkait Penghidupan Layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Kata kunci terakhir yaitu Pemerataan Kesejahteraan yang sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan sehingga dirumuskan sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial. Sasaran–sasaran tersebut telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I-8
Indikator dan Sasaran Terbangunnya Perekonomian
Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak
dan Pemerataan Kesejahteraan

SASARAN	INDIKATOR
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan
	Rasio Gini
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

3. Tujuan 3: Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Tujuan dari dimensi manusia (*human*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Manusia yang diukur oleh BPS. Frase dan kata kunci dari tujuan ketiga ini yaitu '*Pembangunan Manusia*', '*Madani*', dan '*Berkesetaraan*'. Kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu: Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

Adapun standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada tujuan ketiga ini. Selanjutnya, kata kunci Madani merupakan penerjemahan dari konsep *civil society* yang bermakna sebuah tatanan masyarakat modern demokratis dalam berinteraksi di dunia yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban. Untuk itu, dirumuskan sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.

Kata kunci terakhir yaitu Berkesetaraan merupakan suatu kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender'. Secara lebih lengkap, sasaran-sasaran tersebut telah dirumuskan bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I-9
Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan
Manusia Madani yang Berkesetaraan

SASARAN	INDIKATOR
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

4. Tujuan 4: Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Tujuan dari dimensi pemerintahan (*governance*) ini memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB. Frase dan kata kunci dari tujuan keempat ini yaitu '*Transformasi Pelayanan Publik*', '*Manajemen Pemerintahan*', dan '*Berintegritas*'. Kata kunci Transformasi Pelayanan Publik menggambarkan kondisi dimana praktik dan persepsi layanan publik tidak lagi dianggap menyulitkan dan mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tersedia secara maksimal. Untuk itu, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat dan Ter-Akselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Kota Cerdas.

Selanjutnya, kata kunci Manajemen Pemerintahan memiliki makna proses internal pemerintah yang akuntabilitasnya terjaga baik dari sisi pengelolaan kinerja maupun keuangan. Sejalan dengan kondisi yang ingin dicapai, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah dan

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Kata kunci terakhir yaitu Berintegritas dapat diaplikasikan dalam semua lini pemerintahan, namun terutama pada aparatur sipil negara. Konsep ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur. Rumusan sasaran-sasaran tersebut beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel I-10
Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan
Manusia Madani yang Berkesetaraan

SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berikut merupakan program prioritas yang dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan. Program-program tersebut sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program-program prioritas dalam mendukung pencapaian 4 tujuan dan 17 sasaran dalam RPD 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

a) Sasaran Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 3) Program Pengembangan Perumahan;
- 4) Program Kawasan Permukiman;
- 5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- 6) Program Penatagunaan Tanah; dan
- 7) Program Pengelolaan Persampahan.

b) Sasaran Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 4) Program Pengelolaan Pelayaran; dan
- 5) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

c) Sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)

- 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 - 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - 9) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - 11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 12) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 13) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 14) Program Pengelolaan Hutan;
 - 15) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 16) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
 - 17) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - 18) Program Pengelolaan Energi Terbarukan; dan
 - 19) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
- d) Sasaran Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 3) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Program Penanggulangan Bencana;
 - 5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
 - 6) Program Pengelolaan Aspek Geologi.

2. Tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

a) Sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 9) Program Penyuluhan Pertanian;
- 10) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 12) Program Pengembangan Ekspor;
- 13) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 14) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 15) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
- 16) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

b) Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;

- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - 4) Program Hubungan Industrial;
 - 5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 6) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - 7) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - 8) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - 9) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);dan
 - 10)Program Pengembangan UMKM.
- c) Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial
Program yang mendukung sasaran yaitu:
- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Program Rehabilitasi Sosial;
 - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 4) Program Penanganan Bencana;
 - 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - 6) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - 7) Program Pengawasan Keamanan Pangan;dan
 - 8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- d) Sasaran Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi
Program yang mendukung sasaran yaitu:
- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 4) Program Pengembangan Kebudayaan;
 - 5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - 6) Program Pengelolaan Permuseuman;

- 7) Program Pembinaan Perpustakaan;
 - 8) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
 - 9) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
 - 10) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan
- a) Sasaran Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan
 - b) Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
Program yang mendukung sasaran yaitu:
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 - 6) Program Pengendalian Penduduk;
 - 7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - 8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - 9) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - 10) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; dan
 - 11) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

c) Sasaran Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak.

d) Sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

4. Tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintah Berintegritas

a) Sasaran Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
 - 5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - 7) Program Pengelolaan Arsip;
 - 8) Program Pengelolaan Kecamatan;
 - 9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
 - 10) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b) Sasaran Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas
Program yang mendukung sasaran yaitu:
- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 - 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - 4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- c) Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
Program yang mendukung sasaran yaitu:
- 1) Program Penataan Organisasi;
 - 2) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
 - 3) Program Perekonomian dan Pembangunan;
 - 4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
 - 7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- d) Sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
Program yang mendukung sasaran yaitu:
- 1) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;

- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e) Sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- 1) Program Kepegawaian Daerah; dan
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Gambar I-15
Arah kebijakan pembangunan tahunan 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, mengacu pada tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026, tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah **“Peningkatan Ketahanan Kota melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”**. Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman penyusunan tema pembangunan yang dirumuskan berupa **‘Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia’**.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD tahun 2022 dan fokus pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang tertera dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Keterkaitan antar unsur tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel I-11
Prioritas Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
TUJUAN: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1. Penanggulangan Banjir Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: - Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir - Upaya Pencegahan Banjir 2. Penanganan Kemacetan Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: <i>Transport Demand Management</i>; dan - Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur
Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	
TUJUAN: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	
Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu - Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan - Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan berusaha. 2. Penanggulangan Kemiskinan Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: - Penurunan beban pengeluaran masyarakat - Peningkatan pendapatan masyarakat - Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	
Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Percepatan Penurunan Stunting Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; • Intervensi pencegahan stunting
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	
Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	
Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Penguatan Nilai Demokrasi Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: • Perbaikan kualitas layanan publik; • Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; dan • Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ter Akselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	
Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	
Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2025

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang berisikan tentang jenis layanan dasar terhadap 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Urusan Pemerintahan bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Secara eksplisit pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud, mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara kekhususannya Otonomi Daerah berada pada level Provinsi yang melaksanakan penerapan SPM bagi seluruh jenis layanan dasar pada tingkat Provinsi.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyempurnakan dan mencabut pedoman penerapan SPM sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun pedoman teknis Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu layanannya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta

NO.	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2024	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	83,55	84,15	0,72
2	Angka Kemiskinan	4,44%	4,14%	-6,76
3	Angka Pengangguran	6,53%	6,21%	-4,90
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,96%	4,90%	-1,21
5	Pendapatan per Kapita	Rp322,62juta	Rp344,35juta	6,74
6	Ketimpangan Pendapatan	0,431	0,431	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan kesejahteraan dalam berbagai aspek, antara lain dengan menjelaskan aksesibilitas penduduk terhadap kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (BPS, 2024). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi/ indikator dasar yaitu:

- a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)
UHH menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan yang baik sesuai kondisinya pada saat lahir akan terus berlanjut sepanjang hidupnya.

- b. Dimensi Pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

HLS menggambarkan perkiraan atas rata-rata lama pendidikan formal yang dapat diikuti oleh anak berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. Sedangkan RLS merupakan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal. Nilai RLS yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat telah mengikuti tingkat pendidikan dengan baik.

- c. Dimensi Standar Hidup Layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan)

Dimensi ini mengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti makanan, pakaian, perumahan, sanitasi, air bersih, dan kebutuhan lainnya yang menunjang kehidupan yang layak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 56/12/31/Th.XXVI yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 2 Desember 2024, IPM DKI Jakarta tahun 2024 mencapai 84,15 atau meningkat 0,60 poin (0,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 83,55.

Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, dimana UHH meningkat sebesar 0,18 tahun yaitu menjadi 75,99 tahun dari 75,81 pada 2023; HLS meningkat 0,18 tahun dimana dari 13,33 tahun pada 2023 menjadi 13,51 tahun; RLS meningkat sebesar 0,04 tahun yaitu dari 11,45 tahun menjadi 11,49 tahun pada 2024; serta rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 19,95 juta rupiah per tahun atau meningkat 580 ribu rupiah (2,99 persen) dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Gambar II-1
Tren Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Capaian IPM DKI Jakarta tahun 2024 mengindikasikan status pembangunan manusia DKI Jakarta tercatat “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini merepresentasikan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia dengan peningkatan IPM rata-rata sebesar 0,67 persen per tahun yakni dari 81,92 pada 2020 menjadi 84,15 pada 2024.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dibagi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100 persen. Adapun Garis Kemiskinan (GK) diukur berdasarkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan (GKM) maupun kebutuhan bukan makanan (GKBM).

Berdasarkan rilis terakhir BPS Provinsi DKI Jakarta melalui Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/31/Th.XXVII tanggal 15 Januari 2025, angka kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 4,14 persen pada September 2024 atau mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 4,3 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 pada saat angka kemiskinan mengalami kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 4,72 persen, angka kemiskinan September 2024 menurun sebesar 0,58 persen poin.

Gambar II-2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2018-2024 menunjukkan angka kemiskinan tertinggi terukur pada Maret 2021 dan Maret 2022 sebanyak 502 ribu orang. Angka kemiskinan tertinggi terukur sejak Maret 2021 sebesar 4,72 persen dan setelahnya bergerak fluktuatif dengan kondisi akhir 4,14 persen di September 2024 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Pada periode waktu yang sama, penduduk Jakarta dari total populasi yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan yang sama mencapai 449,07 ribu orang atau menurun sebanyak 15,86 ribu orang terhadap kondisi Maret 2024 yang mencapai 464,93 ribu orang. Namun demikian, angka kemiskinan per September 2024 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19, yakni per September 2019 sebanyak 362,3 ribu orang. Tren penurunan angka kemiskinan DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, yaitu dari 4,69 persen (Maret 2022) menjadi 4,44 persen (Maret 2023), dan 4,30 persen (Maret 2024). Angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir ini menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan program pengentasan kemiskinan secara konsisten. membaiknya capaian beberapa indikator makro ekonomi berkaitan erat dengan penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta.

Selain itu, konsistensi dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan termasuk pemberian bantuan sosial turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Masyarakat rentan miskin di DKI Jakarta selain menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat juga menerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Program Bantuan Pangan. Program bantuan lain meliputi pemberian insentif untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun sewa sederhana (Rusunawa), Pemberian Pelatihan Kerja secara gratis oleh Balai Latihan Kerja, dan lain sebagainya. Seluruh upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengendalikan angka kemiskinan di DKI Jakarta.

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT dihitung dari persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah penduduk usia kerja (penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih) yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sementara itu, angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada 5 November 2024, TPT DKI Jakarta pada Agustus 2024 sebesar 6,21 persen atau mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6,53 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur. Lebih detail lagi, pada periode yang sama, TPT laki-laki mencapai 6,23 persen, sedangkan TPT perempuan lebih tinggi dengan 6,17 persen. Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan SMA kejuruan merupakan yang paling tinggi (8,47 persen) sedangkan TPT tamatan SMP menjadi yang paling rendah (4,15 persen).

Gambar II-3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021-2024 menunjukkan tren yang semakin menurun, terakhir dengan penurunan sebesar 0,32 persen poin pada Agustus 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 di Jakarta, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor perdagangan sebesar 23,05 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,71 persen; serta sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 11,84 persen. Adapun status pekerjaan

utama penduduk Jakarta terbagi menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yaitu formal dan informal. Kegiatan formal mencakup penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan kegiatan informal mencakup penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pada Agustus 2024, jumlah penduduk Jakarta yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,25 juta orang (63,69 persen) dan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,85 juta orang (36,31 persen). Persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 10/02/31/Th.XXVII yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada 5 Februari 2025, pengukuran pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menggunakan besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB Jakarta tahun 2024 mencapai Rp.3.679,36 triliun sedangkan PDRB ADHK mencapai Rp.2.151,04 triliun.

Gambar II-4
Pertumbuhan PDRB (c-to-c)
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Pertumbuhan PDRB (*c-to-c*) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024 mengalami kontraksi pada tahun 2020 mencapai -2,39 persen. Pertumbuhan PDRB terus menerus mencapai angka positif sejak 2021 dan berlanjut hingga 2024 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pemulihan setelah mengalami kontraksi sebesar -2,39 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19, yang berdampak besar pada sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Sejak 2021, perekonomian mulai bangkit dengan pertumbuhan positif yang terus berlanjut hingga 2024. Pada 2024, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 4,90 persen (*c-to-c*), sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 (4,96 persen), namun tetap mencerminkan stabilitas pemulihan.

Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,31 persen), Konstruksi (6,99 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (6,96 persen). Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi (11,82 persen), disusul oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (9,64 persen), Komponen PK-P (8,72 persen), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) (5,23 persen).

Struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,01 persen), Industri Pengolahan (11,49 persen), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (11,09 persen). Sementara dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta PK-RT yang masing-masing berkontribusi sebesar 70,37 persen dan 62,03 persen.

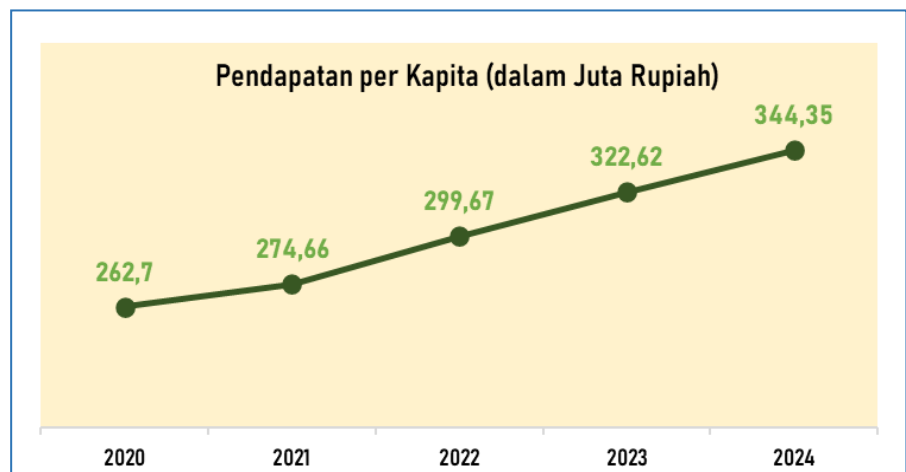
2.1.5 Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu

daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.

Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan PDRB ADHB, yakni dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2024, PDRB per kapita DKI Jakarta tercatat sebesar Rp.344,35 juta atau meningkat 6,31 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp.322,62 juta. Tren PDRB per kapita DKI Jakarta dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan kenaikan bertahap dari Rp.262,7 juta pada 2020 menjadi Rp.299,67 juta pada 2022, hingga akhirnya mencapai Rp.344,35 juta pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Gambar II-5
PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Provinsi DKI Jakarta Selama periode 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk menggunakan indikator Rasio Gini yang diukur oleh BPS. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati 0 menunjukkan

distribusi pendapatan yang lebih merata. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan sempurna, dimana setiap individu memiliki pendapatan yang sama, sedangkan nilai 1 mencerminkan ketimpangan ekstrem, dimana satu individu menguasai seluruh pendapatan sementara yang lain tidak memiliki apa pun.

Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per September 2024 sebesar 0,431 atau mengalami peningkatan dibandingkan kondisi Maret 2024 yang mencapai 0,423 dengan selisih sebesar 0,008 poin. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antara penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin tinggi.

Gambar II-6
Tren Rasio Gini
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2025

Dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Berdasarkan tren tahun 2017-2024, rasio gini DKI Jakarta lebih tinggi dari nasional dengan gap yang semakin besar pada tahun 2024. Kesenjangan ini terlihat semakin melebar sejak tahun 2020 pada saat rasio Gini DKI Jakarta mengalami tren kenaikan yang lebih tajam dibandingkan rasio Gini nasional yang relatif stabil. Kenaikan rasio Gini DKI Jakarta setelah 2020 menandakan ketimpangan pengeluaran yang terus meningkat, sementara tingkat ketimpangan nasional cenderung mengalami sedikit fluktuasi tanpa perubahan signifikan. Pada 2024, selisih rasio Gini DKI Jakarta dengan nasional mencapai titik tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas ekonomi di ibu kota semakin melebar dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tapi juga sampai pada kewenangan Kabupaten/Kota Administrasi.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel II-2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
Provinsi DKI Jakarta

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
Urusan Pendidikan Provinsi	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	98,21	Dinas Pendidikan
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	98,58	Dinas Pendidikan
Urusan Kesehatan Provinsi	1.b.1	Rasio daya tamping rumah sakit rujukan	2,59	Dinas Kesehatan
	1.b.2	Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi	98,93	Dinas Kesehatan
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	Dinas Kesehatan
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100,00	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi	1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	102,31	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi	65,86	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	94,33	Dinas Sumber Daya Air
	1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	79,19	Dinas Sumber Daya Air

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi	1.c.5	Rasio kemantapan jalan	97,30	Dinas Bina Marga
	1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	100,00	DSDA, DBM, Disnakertransgi, DCKTRP, BPPBJ
	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
	1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
	1.d.3	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	82,41	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
	1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi	1.e.1	Persentase gangguan kententeraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.e.2	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Sosial Provinsi	1.f.1	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.2	Tingkat persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.3	Tingkat persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.4	Tingkat persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	Dinas Sosial
	1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	100,00	Dinas Sosial

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
Urusan Tenaga Kerja Provinsi	2.a.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	94,45	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.2	Tingkat produktifitas tenaga kerja	39.499.281.093,39	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi
	2.a.3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	96,04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	90,04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	2.a.5	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	96,04	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	2.b.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,70	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.b.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3,35	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.b.3	Pasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	23,20	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Urusan Pangan Provinsi	2.c.1	Persentase cadangan pangan	100,00	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Urusan Pertanahan Provinsi	2.d.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,00	DSDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, Distamhut, DPMPTSP
	2.d.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100,00	DSDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, Distamhut, DPMPTSP
	2.d.3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100,00	DSDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, Distamhut, DPMPTSP
Urusan Lingkungan Hidup Provinsi	2.e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) provinsi	56,39	Dinas Lingkungan Hidup
	2.e.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	84,22	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	2.f.1.1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.f.1.2	Pemanfaatan data kependudukan	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100,00	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100,00	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi	2.h.1	TFR (angka kelahiran total)	1,82	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.h.2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	41,29	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15,61	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Urusan Perhubungan Provinsi	2.i.1	Rasio konektivitas	0,78	Dinas Perhubungan
	2.i.2	V/C rasio	0,61	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.j.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	60,36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	99,40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi	2.k.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	21,89	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.k.2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	1,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Penanaman Modal Provinsi	2.l	Persentase peningkatan investasi di provinsi	45,08	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi	2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,61	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.m.3	Peningkatan prestasi olahraga	770	Dinas Pemuda dan Olahraga
Urusan Statistik Provinsi	2.n.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.n.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Urusan Persandian Provinsi	2.o	Tingkat keamanan informasi pemerintah	99,22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Urusan Kebudayaan Provinsi	2.p	Terlestarikannya cagar budaya	100,00	Dinas Kebudayaan
Urusan Perpustakaan Provinsi	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.q.2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	94,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan Provinsi	2.r.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	70,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.r.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	97,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan				
Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi	3.a.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	157,20	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.a.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	90,31	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Urusan Pariwisata Provinsi	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	29,16	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	10,66	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	51,87	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,85	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Pertanian Provinsi	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	546,21	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.c.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-12,50	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Urusan Kehutanan Provinsi	3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan social	100,00	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
	3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	-	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
	3.d.3	Persentase luas lahan kritis yang di rehabilitasi	-	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	3.e.1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	3.e.2	Persentase desa yang teraliri listrik	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Urusan Perdagangan Provinsi	3.f.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,45	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.f.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	98,36	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.f.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	95,50	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.f.4	Tertib usaha	22,22	DPPKUKM, DPMPTSP
	3.f.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	51,98	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	3.f.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	50,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.f.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
Urusan Perindustrian Provinsi	3.g.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	6,14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	81,67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	65,74	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Urusan Perindustrian Provinsi	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	50,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Transmigrasi Provinsi	3.h	Tidak ada kewenangan provinsi	100,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2025

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II-3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Perencanaan dan Keuangan Provinsi	4.a.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,04	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.2	Rasio PAD	69,55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	65,36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.4	Opini laporan keuangan	7	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
	4.a.6	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
Pengadaan Provinsi	4.i.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	16,66	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.i.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	50,13	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.i.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	52,43	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.i.4	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	26,63	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Urusan Pemerintahan	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Capaian	Sumber Data
Kepegawaian Provinsi	4.j.1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69,40	Badan Kepegawaian Daerah
	4.j.2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	14,29	Badan Kepegawaian Daerah
	4.j.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
Manajemen Keuangan Provinsi	4.k.1	<i>Budget execution</i> : deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,94	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.k.2	<i>Revenue mobilization</i> : deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0,53	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.k.3	<i>Assets management</i>	4	Badan Pengelolaan Aset Daerah
	4.k.4	<i>Cash management</i> : rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,96	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Transparansi dan Partisipasi Publik Provinsi	4.l.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	91,84	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.l.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>public access to fiscal information</i>)	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2024

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 17 Sasaran dan 22 Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Gubernur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur No/168/2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, sesuai pada tabel di bawah ini:

TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
1		Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni	71	Indeks
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	77.24	Persen
	2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi public	20.97	Persen
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	55.43	Indeks
			2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	25.4	Persen
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	1	Indeks Risiko Bencana	59.66	Indeks
2		Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	7.81	Indeks
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	4.8 – 5.6	Persen
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	6.53	Persen
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Rasio Gini	0.410	Koefisien
			2	Tingkat Kemiskinan	3.79	Persen
			3	Tingkat Kemiskinan Ektrem	0.5	Persen
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	4.01	Indeks
3		Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	83.55	Indeks
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi Pendidikan	12.16	Tahun

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan		Angka Harapan Hidup	75.81	Tahun
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	13.2	Persen
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	95.14	Indeks
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	82.13	Indeks
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		83	Indeks
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	91.08	Indeks
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.21	Indeks
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 (A)	Predikat
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	75	Indeks
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Opini
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	350.5	Indeks

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Kegub No 168 Th 2024)

B. Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 berdasarkan Tabel di atas, dari 26 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024, sebanyak 15 (lima belas) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 4 (empat) indikator belum mencapai sesuai target yang ditetapkan serta terdapat 7 (tujuh) Indikator yang belum mempunyai data realisasi (N/A) dikarenakan belum dirilisnya data realisasi di tahun 2024, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Indeks	71	N/A (belum rilis)	-
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	77.24	77,66	100.54%
	2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	20.97	22.19	105.82%
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55.43	56.39	101.73%
			2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	25.4	25,9	101.97%
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana	Indeks	59.66	N/A (belum rilis)	-
2	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	7,81	N/A (belum rilis)	-
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4.8 – 5.6	4.90	100%
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	6.53	6.21	105.15%
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	3.79	4.14	91.55%
			2	Rasio Gini	Koefisien	0.410	0,431	95,13%
			3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0.5	0,35	142.86%
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4.01	N/A (belum rilis)	-

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3		Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83.55	84.15	100.72%
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan	Tahun	12,16	12,5	102.80%
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75.81	75,99	100.24%
			2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) Balita	Persen	13.2	N/A (belum rilis)	-
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.14	N/A (belum rilis)	-
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	Indeks	82.13	84.57	102.97%
4		Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83	N/A (belum rilis)	-
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91.08	93.36	105.37%
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4.21	4,46	105.94%
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	84 (A)	81,66	97.21%
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	75	72,34	96.45%
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	350.5	350.5	100%

Sumber : Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

1. Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencapai tujuan pertama ini yaitu 'Regenerasi Kota', 'Ketahanan', dan 'Berkelanjutan'. Regenerasi kota merupakan upaya pembangunan atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi dua sasaran yaitu 'Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas' dan 'Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit'.

Kedua sasaran ini dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan perkotaan yang memadai, dengan infrastruktur terkait mobilitas mendapatkan highlight utama sehingga diangkat menjadi sasaran tersendiri. Kata kunci selanjutnya yaitu ketahanan, ketahanan dimaksud mengadopsi prinsip-prinsip resilient city yang kemudian diturunkan menjadi sasaran 'Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota'.

Kata kunci terakhir yaitu berkelanjutan, mewakilkan V-323 harapan bahwa seluruh pembangunan di Jakarta akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga untuk menjamin hal tersebut dirumuskan sasaran 'Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon'. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	71	N/A (belum rilis)	-
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	77.24	77,66	100.54%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	20.97	22.19	105.82%
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55.43	56.39	101.73%
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	25.4	25,9	101.97%
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks resiko bencana	Indeks	59.66	N/A	-

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator sebagai berikut :

Indeks Kota Layak Huni

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dtargetkan untuk mencapai Indikator Kota Layak Huni sebesar 71. Penilaian atas capaian indikator ini adalah berdasarkan Studi Most Livable City Index melalui penilaian atas beberapa aspek prinsip-prinsip Kota Layak Huni antara lain aspek ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik), aspek ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan), aspek ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat, aspek Keamanan, aspek dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota, serta aspek sanitasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya dan sifatnya adalah potret atau snapshot terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia yang dipublikasikan secara rutin melalui laman <http://iapindonesia.org>.

Informasi penilaian atas indikator ini terakhir diterbitkan oleh IAP Indonesia adalah pada tahun 2022. Berdasarkan laporan akhir yang dipublikasikan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia melalui laman

resminya <http://iapindonesia.org> pada tahun 2023, *Most Livable City Index* (MLCI/Indeks Kota Layak Huni) dengan 28 kriteria penilaian yang menjadi tolok ukur tingkat kelayakan sebuah kota, Provinsi DKI Jakarta memperoleh skor 71,3. Dari 28 kriteria yang menjadi penilaian, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penilaian tertinggi pada 5 kriteria yang menjadi tolok ukur antara lain pada kriteria fasilitas peribadatan, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik Pemerintahan, Jaringan Telekomunikasi, Fasilitas Kesehatan dan Ketahanan Pangan.

Selain mendapat nilai tertinggi pada 5 kriteria yang telah disebutkan, Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan penilaian 5 indeks terendah pada Sektor-sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, Perekonomian Kota dan Fasilitas Kesenian dan Budaya. Sedangkan penilaian tahun 2024 atas indikator ini belum di publikasikan oleh IAP Indonesia, sehingga data capaian pada setiap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta masih tercatat sebagai data Not Available (N/A) sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel II-6
Capaian IKU Indeks Kota Layak Huni

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	71	N/A	-

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berikut perbandingan capaian tahun 2024 dengan target Tahun RPD 2023-2026:.

Tabel II-7
Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	65	71.3	71	N/A	67	68

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka menunjang ketercapaian Indikator Kota Layak Huni pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

yang ditetapkan melalui tujuan/sasaran “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penetrasi keuangan melalui beberapa program dan kegiatan disetiap tahun anggarannya yang terbagi dalam beberapa sektor pembangunan. Untuk Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa tujuan dan sasaran sektor yang dilakukan penetrasi antara lain:

- a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- b. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
- d. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kota Layak Huni adaah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.470	13.778.904.342.076	90,44%
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	452.524.707.988	437.392.871.999	96.66%
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (Air Minum)	22.266.374.312	20.404.747.385	91.64%
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	659.333.715.040	483.737.685.134	73.37%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Tingkat keberhasilan dalam mencapai Indikator Kota Layak Huni bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya didasarkan pada faktor dukungan anggaran saja namun juga terdapat beberapa faktor pendukung lainnya antara lain:

- a. Perwujudan program, anggaran dan kebijakan Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Kajian atau masukan dari para ahli/pakar tata kota terkait pencapaian Kota Layak Huni.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dalam rangka mencapai target Indikator Indeks Kota Layak Huni kemungkinan masih sama dengan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu masih kurang/rendahnya tingkat kemudahan memperoleh pekerjaan, tingkat kemudahan memiliki rumah, dan tingkat persepsi kondisi lalu lintas/kemacetan.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, kedepan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaannya akan berfokus kepada Sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, dan Perekonomian Kota.

1.1 Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 ditargetkan untuk mencapai Indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan sebesar 77,24 persen. Penilaian atas capaian indikator ini adalah berdasarkan pemenuhan layanan dasar perkotaan merupakan pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu: 1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi; 2) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan

Sumber Air Minum Layak; serta 3) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak.

Penilaian atas indikator ini terakhir diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik hasil pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu: 1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi; 2) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak; serta 3) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik pada laman resminya yang dirilis pada tanggal 2, 3 dan 9 Desember 2024, disampaikan bahwa capaian untuk masing-masing sub indikator tersebut pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut provinsi, yaitu sebesar 39.00%;
- b. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak, yaitu sebesar 99.96%; dan
- c. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, yaitu sebesar 94.01%.

Sehingga rata-rata realisasi ketiga sub indikator dimaksud yaitu sebesar 77,66%.

Tabel II-8
Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	77.24	77.66	100.54%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun realisasi pada tahun 2024 sebesar 77.66%, dimana target pada dokumen Perjanjian kinerja disesuaikan dengan realisasi tahun 2023, dan untuk target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 70.1 yang kemungkinan akan dilakukan penyesuaian disetiap tahunnya..

Tabel II-9
Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69.06	77.24	77.24	77.66	69.84	70.1

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Dalam rangka menunjang ketercapaian Indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 yang ditetapkan melalui tujuan/sasaran “Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penetrasi keuangan melalui beberapa program dan kegiatan disetiap tahun anggarannya yang terbagi dalam beberapa sektor pembangunan. Untuk Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa tujuan dan sasaran sektor yang dilakukan penetrasi antara lain:

- a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- b. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
- d. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program mendukung terkait dengan capaian Indikator Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan yaitu :

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.476	13.778.904.342.076	90,44%
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	452.524.707.988	437.392.871.999	96.66%
	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	22.266.374.312	20.404.747.385	91.64%
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	659.333.715.040	483.737.685.134	73.37%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun jumlah anggaran diatas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kota Layak Huni adaah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan (Hunian Layak) sebesar 452.524.707.988 dengan realisasi sebesar 437.392.871.999 atau 96,66%, anggaran ini diperuntukkan untuk pembangunan unit rumah susun sewa dan penataan kawasan permukiman.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Minum) sebesar 22.266.374.312 dengan realisasi sebesar 20.404.747.385 atau 91,64%. Anggaran program kegiatan ini diperuntukkan bagi Pembangunan sistem distribusi IPA Setu Babakan (segmen 1 s.d 4), Subsidi Air Bersih dan Verifikasi Pemberian Subsidi Air Bersih untuk Daerah Krisis Air dan Kepulauan Seribu, Penerapan Zona Bebas Air Tanah dalam mendukung percepatan peningkatan layanan air bersih perpipaan, dan Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Air Limbah/Sanitasi) sebesar 659.333.715.040 dengan realisasi sebesar 483.737.685.134 atau 73,37%. Anggaran ini diperuntukkan bagi

Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPALD, Pembangunan JSS Zona 1, Kolaborasi penyediaan layanan sanitasi dengan berbagai stakeholder, Revitalisasi Tangki Septik (Subsidi), dan Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan antara lain:

a. Untuk pemenuhan sumber air minum :

- Kondisi daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk dijadikan sumber air minum sehingga bergantung/membutuhkan pasokan air dari daerah lain
- Masih belum sinkronnya data terkait jumlah penduduk/rumah tangga dengan akses sanitasi layak

b. Air Limbah/Sanitasi :

- Adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD skala permukiman
- Adanya kekosongan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik yang menjadi instrumen/alat untuk mengikat dan memaksa masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
- Kepadatan penduduk yang tinggi (>150 jiwa/ha) idealnya menggunakan SPALD Terpusat, namun biaya investasi pengembangan SPALD-T sangat mahal
- Pengelolaan setempat/tangki septik yang dimiliki masyarakat belum dapat terinventarisir sepenuhnya sesuai dengan standar SNI
- Belum optimalnya pemanfaatan SPALD yang sudah terbangun

Rencana yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian indikator ini adalah :

- a. Untuk pemenuhan Hunian Layak Provinsi DKI Jakarta akan selalu berupaya dan melanjutkan dalam menyediakan Hunian Layak Bagi Seluruh Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
- b. Pemenuhan sarana air bersih layak minum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target cakupan air perpipaan di tahun 2030 100% dengan cara pembangunan dan pengembangan IPA komunal, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pendampingan pembangunan SPAM Jatiluhur-Hilir (4000 Lps), SPAM Karian Serpong-Hilir (3200 Lps).
- c. Untuk Pemenuhan sarana air limbah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan jaringan pipa air limbah JSDP (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 1 Paket 5 dan Paket 6, Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman (sistem perpipaan dan interceptor), dan Peningkatan kapasitas

Jumlah Sambungan Rumah (SR), Optimalisasi Jaringan Perpipaan, pembangunan SPALD-Setempat, dan penyiapan kebijakan terkait Revitalisasi Tangki Septik.

1.1. Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

Indikator Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik merupakan sasaran dari Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Indikator ini merupakan penggambaran besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam pergerakannya.

Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik sebesar 20,97% yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Tabel II-10
Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	20,97

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Realisasi Capaian nilai Persentase Perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian sebesar 22,19% berdasarkan hasil perolehan jumlah perjalanan dengan angkutan umum sebesar 4.485.930 perjalanan/hari dan hasil perhitungan data lalu lintas tahun 2024 sebesar 20.214.870 perjalanan/hari.

Tabel II-11
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	20,97	22,19	105,82

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Adapun realisasi jumlah perjalanan penumpang angkutan umum sebanyak 12 moda pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II-12
Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2024

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah	Satuan
1.	Transjakarta	1.230.545	Perjalanan/hari
2.	KRL	828.679	Perjalanan/hari
3.	MRT	110.381	Perjalanan/hari
4.	LRT Jakarta	3.310	Perjalanan/hari
5.	LRT Jabodetabek	6.096	Perjalanan/hari
6.	Railink	6.102	Perjalanan/hari
7.	Bus/Angkot reguler	254.684	Perjalanan/hari
8.	Ojek (<i>Online</i>)	1.202.049	Perjalanan/hari
9.	Taxi Bajaj	20.414	Perjalanan/hari
10.	ASK	601.048	Perjalanan/hari
11.	Kapal	3.418	Perjalanan/hari
12.	Bus Sekolah	39.242	Perjalanan/hari
Jumlah perjalanan dengan angkutan umum		4.485.930	Perjalanan/hari

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data perbandingan antara jumlah perjalanan menggunakan 12 (dua belas) moda angkutan umum dengan jumlah perjalanan per hari pada tahun 2024, maka persentase jumlah perjalanan yang menggunakan angkutan umum di DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 22,19%.

Sasaran Indikator kinerja utama persentase jumlah perjalanan dengan angkutan umum di DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-13
Target RPD

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18.78	18.86	20,97	22,19	21.87	23.01

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan target pada tabel di atas, target akhir untuk persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik sebesar 23,01%. Adapun capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum pada tahun 2024 sebesar 22,19%. Selisih capaian untuk mencapai target akhir sebesar 0,82% sehingga diperlukan peningkatan kinerja dalam implementasi strategi manajemen kebutuhan lalu lintas (*Transport Demand Management*).

Sehubungan dengan capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum Tahun 2024, ada beberapa program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan capaian tersebut terdiri dari :

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu:

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	1	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	6.269.558.691.719	5.705.198.220.669	91%
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.688.870.992.730	5.188.068.074.657	91,20%
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.861.812	273.816.060	95,45%
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	463.975.969.701	405.253.343.502	87,34%

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	18.899.312.333	16.857.472.442	89,20%
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	31.432.293.033	30.571.651.993	97,26%
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	15.125.098.221	15.046.076.403	99,48%
	2		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	39.767.739.396	35.829.816.457	90,10%
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	27.672.910.995	24.152.672.267	87,28%
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.043.167.626	10.711.571.236	97,00%
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1.051.660.775	965.572.954	91,81%
	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77%
			Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	3.939.602.119	3.615.327.522	91,77%
	4		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	856.741.629.586	812.987.434.642	94,89%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.787.886.488	66.205.814.678	88,52%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.760.628.597	56.160.010.135	97,23%

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.744.295.549	98.469.306.537	94,01%
			TOTAL	6.499.590.679.979	5.916.350.710.386	91,03%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Realisasi anggaran dalam program penunjang persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2024 terlaksana sebesar Rp 5.916.350.710.386 dari total pagu anggaran sebesar Rp 6.499.590.679.979, atau capaian sebesar 91,03% dengan efisiensi sebesar 9,97% dari nilai total pagu anggaran.

Selain program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menunjang pencapaian indikator tersebut, seperti KSD nomor 2 Penanganan Kemacetan dan 8 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan, dengan renaksi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel;
 - a. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1 B Velodrome-Manggarai
 - b. Pembangunan MRT Fase 2 A (Bundaran HI-Kota)
 - c. Perencanaan Pembangunan MRT East-West Phase 1 Stage 1
- 2) Pengembangan Transit Oriented Development (TOD);
 - Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait peningkatan dan pengembangan area stasiun Tanah Abang
- 3) Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapanya.
 - a. Penyelesaian Trotoar Complete Street di Provinsi DKI Jakarta
 - b. Pelaksanaan Bulan Tertib Trotoar

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) di atas telah dilaksanakan dan hasilnya mencapai target yang ditetapkan dalam KSD guna mendorong pencapaian indikator persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik.

Secara nasional, penggunaan angkutan umum di Indonesia mengalami peningkatan pada masing-masing moda perjalanan. Jumlah penumpang angkutan udara domestik pada periode Januari-Agustus 2024 sebesar 42,0 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebesar 12,3 juta orang, meningkat sebesar 1,50% dan 23,94% dari tahun 2023 (BPS, 2024). Adapun jumlah penumpang

angkutan laut mencapai 17,3 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 26,02% dari tahun sebelumnya dan jumlah penumpang angkutan kereta api sebesar 277,5 juta orang, atau naik 14,87% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh beberapa institusi, persentase penggunaan angkutan umum di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,25% sedangkan 71,65% dari responden menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda utama perjalanan (Statista, 2024).

Secara umum capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2023 telah tercapai karena koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholder* yang baik serta adanya komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan penggunaan moda angkutan umum di DKI Jakarta. Selain itu, implementasi strategi integrasi antar moda, seperti integrasi layanan, integrasi tarif, dan fisik juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target penggunaan angkutan umum, yaitu adanya layanan *feeder* di beberapa titik simpul transportasi, penataan kawasan stasiun, integrasi tarif antar moda, dan peningkatan infrastruktur *skywalk*/jembatan penghubung antar titik simpul yang memudahkan perjalanan pengguna angkutan umum sehingga aspek kenyamanan dan kemudahan dapat terpenuhi yang dapat meningkatkan penggunaan moda angkutan umum.

Adapun penggunaan angkutan umum masih didominasi oleh angkutan *online*. Harapan mendatang transportasi publik dapat lebih berperan sebagai moda utama perjalanan dengan meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. Beberapa kendala, seperti aspek keandalan, contohnya *headway* yang tidak selalu sesuai pada moda angkutan massal berbasis jalan karena lajur masih bersinggungan dengan kendaraan lain, keterbatasan lahan sehingga kenyamanan pada titik simpul tidak dapat optimal. Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan persentase penggunaan angkutan publik Tahun 2024 antara lain:

Tabel II-14
Faktor Keberhasilan

No	Faktor	Kegiatan
1.	Koordinasi antar stakeholder yang intensif	– Rapat monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum massal (BRT, MRT, LRT) secara berkala; – Pembahasan Rencana pengembangan angkutan massal MRT East - West – Pembahasan LRT Velodrome - Manggarai – Penandatanganan perjanjian kerja sama <i>e-ticketing</i> angkutan perairan
2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum layanan angkutan umum	Pengawasan pelaksanaan SPM pada Transjakarta, MRT, LRT
3.	Dukungan Pengoperasian angkutan umum massal	– Dukungan feeder dan prasarana lalu lintas pada pengoperasian layanan angkutan umum baru, seperti Kereta Cepat, LRT Jabodebek – Penyiapan kantong parkir atau park&ride pada area titik simpul angkutan umum
4.	Perluasan layanan angkutan umum	– Pelaksanaan layanan Transjakarta pada Bandara Soekarno Hatta – Penambahan jam operasional layanan angkutan umum pada acara-acara besar (event musik, tahun baru, dll)
5.	Integrasi	– Tarif Integrasi pada Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta – Integrasi LRT Jabodebek – Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Stasiun KRL – Pemasangan prasarana lalu lintas pada simpul transportasi terintegrasi – Aplikasi JaketBoat
6.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung angkutan umum	– Modernisasi Terminal Kampung Rambutan – Optimalisasi Dermaga Apung Pulau Tidung – Peningkatan fasilitas dermaga pelabuhan di Kepulauan Seribu – Inspeksi Keselamatan (Ramp Check) pada Bus-Bus AKAP
7.	Inklusivitas dalam transportasi umum	– Keberpihakan pada disabilitas dengan pemberian kartu khusus disabilitas bagi penyandang disabilitas dan berhak mendapatkan tarif gratis – Pemberian subsidi berupa tarif gratis untuk layanan Transjakarta bagi 15 (lima belas) golongan.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Dalam upaya mencapai target perjalanan menggunakan transportasi publik, terdapat tantangan yang dihadapi sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang menjadi tantangan optimalisasi penggunaan perjalanan menggunakan transportasi publik tersebut antara lain:

Tabel II-15
Faktor Penghambat

No	Kendala	Rekomendasi/ Mitigasi
1	Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi	diperlukan kebijakan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi
2	Keterbatasan lahan dalam pengembangan dan peningkatan prasarana angkutan umum	koordinasi dan penyesuaian desain
3	Aspek keandalan angkutan umum	agar angkutan umum lebih adaptif dalam penerapan teknologi untuk layanan angkutan publik, seperti peningkatan pengalaman pengguna dengan peningkatan Sistem Informasi Penumpang (informasi rute, jadwal, lokasi armada, tarif) yang dapat diakses melalui gawai.

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Beberapa strategi praktek yang sesuai untuk keberhasilan penggunaan transportasi publik, adalah sosialisasi dan komunikasi publik secara konsisten. Selain itu, secara proaktif merencanakan layanan, dan fokus terhadap kelompok pengguna tertentu seperti pekerja, komunitas dan kesetaraan sosial serta memperkuat aspek keselamatan (APTA, 2023). Upaya lain adalah dengan memanfaatkan peluang untuk memperluas jumlah penumpang angkutan umum dan terus mengikuti perubahan. Guna meningkatkan persentase perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi sebagai berikut:

Tabel II-16
Rencana Aksi 2025

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025
1	Pemberian subsidi Transjakarta	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
2	Pemberian subsidi MRT	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
3	Pemberian subsidi LRT	Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
4	Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	– Rencana pola operasi dan penambahan jumlah penumpang – Penambahan armada bus sekolah
5	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum Provinsi DKI Jakarta	– Pengemudi angkutan umum yang tersertifikasi – Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum
6	Peningkatan dan pengembangan Angkutan Perairan	– Rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan – Pengadaan kapal angkutan perairan

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025
7	Peningkatan Terminal Bus Tipe A dan Tipe B	– Peningkatan Terminal Tipe A (Peningkatan SPP Terminal Bus Kalideres & Dokumen Kajian Pendukung Revitalisasi Terminal Bus Kampung Rambutan) – Peningkatan Terminal Tipe B (Peningkatan SPP/ Pemeliharaan Terminal Bus Cililitan, Pulogadung, Ragunan, Rawamangun, Muara Angke, TMB Pulogebang)
8	Peningkatan pelabuhan dan dermaga di wilayah DKI Jakarta	– Revitalisasi Pulau Pari
9	Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome – Manggarai	– Surat Penyampaian Dokumen Finalisasi gambar teknis LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai – Rekomendasi Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Persetujuan Andalalin Pembangunan Jalur (Pier 111B-198B) dan Stasiun LRT Fase 1B (Velodrome-Manggarai) – Perizinan dan pembangunan LRT Tahap 1B Velodrome-Manggarai
10	Pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota)	– Pelepasan Hak di Lokasi Grand Paragon Kecamatan Taman Sari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat – Musyawarah bentuk ganti kerugian di Lokasi Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat – Pelepasan Hak di Lokasi Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat – Pengadaan tanah di Lokasi Grand Paragon di lokasi Grand Paragon Kecamatan Taman Sari, Hayam Wuruk Plaza Kecamatan Taman Sari, dan Bidang Tanah Milik L Yudianto Kecamatan Taman Sari
11	Pembangunan MRT Fase 2B	– Penetapan Trasse MRT Fase 2B (Kota – Ancol)
12	Pembangunan MRT <i>East-West</i>	– Review Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) (Lokasi terdiri dari 479 bidang) – Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) ke Gubernur (Lokasi terdiri dari 479 bidang)
13	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Transportasi 1.) Rancangan Peraturan Daerah terkait Rancangan Induk Transportasi 2.) Rancangan Peraturan Daerah terkait Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas)	– Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah – Dokumen hasil kordinasi dengan Biro Hukum terkait Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Transportasi
14	Penyediaan Prasarana Integrasi Antar Moda sebanyak 4 (empat) titik di lokasi Stasiun Angke, Stasiun Buaran, Stasiun Mangga Besar, dan Stasiun Pancasila	– Menyusun Laporan Konsep Perencanaan Titik Integrasi di lokasi Stasiun Angke, Stasiun Buaran, Stasiun Mangga Besar, dan Stasiun Pancasila – Pengadaan Prasarana Integrasi Antar Moda

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

1.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat

komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar.

Rumus yang digunakan untuk penghitungan IKLH adalah:

$$\text{IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

Keterangan:

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut.

- 1) Perhitungan nilai IKA diperoleh dari data hasil pemantauan Kualitas Air Sungai dan hasil pemantauan Kualitas Air Waduk/Danau/Situ yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran kualitas air sungai yang dilakukan sebanyak 8 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, dan Nitrat. Sedangkan pengukuran kualitas air Waduk/Danau/Situ dilakukan sebanyak 10 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecalcoli, Total Fosfat, Kecerahan, klorofil-q, Total nitrogen.
- 2) Perhitungan nilai IKU diperoleh dari data pengukuran kualitas udara dengan menggunakan metode Passive Sampler dengan memasang alat di 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah. Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan sebanyak 2 parameter yaitu SO₂ dan NO₂.
- 3) Perhitungan nilai IKAL diperoleh dari data hasil pemantauan Kualitas Air Laut dan Muara Teluk Jakarta yang dilakukan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Pengukuran kualitas air laut sebanyak 5 parameter yaitu TSS, DO, N-NH3, Orthoposfat dan Minyak Lemak.

- 4) Perhitungan nilai IKTL diperoleh dari data spasial dan non-spasial. Data spasial yang digunakan antara lain dari berbagai peta resmi di jakartasatu.jakarta.go.id dan hasil pengolahan citra satelit resolusi tinggi wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data non-spasial diperoleh dari data kawasan hutan dan data kawasan hutan produksi yang tertuang dalam SK MenKLHK No.452/Menlhk-Setjen/2015 serta berbagai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta. Adapun capaian indikator kinerja utama Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel II-17
Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pemulihan ekosistem kota implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	55.43	56.39	101.73%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun realisasi pada tahun 2024 sebesar 56.39 dengan capaian 101.73%, dimana target pada dokumen Perjanjian kinerja yaitu 55.43 disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya tahun 2023. Sehingga target pada dokumen RPD Tahun 2023-2026 dilakukan penyesuaian, adapun target akhir pada tahun 2026 pada indikator yaitu 56.43.

Tabel II-18
Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54.93	54.97	55.43	56.39	55.93	56.43

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Dalam mencapai capaian IKLH ada beberapa sumber daya yang mendukung diantaranya:

- a. konsultasi teknis dengan KLHK RI Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan pelaksanaan penyusunan IKLH
- b. koordinasi dengan SKPD terkait data hasil pemantauan
- c. monitoring pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan
- d. peningkatan kapasitas terkait pengambilan dan pengujian sampel air dan udara
- e. expose hasil IKLH ke OPD dan stakeholder terkait

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, rumusan perhitungan IKLH dilakukan dengan agregasi terhadap 4 (empat) komponen pembentuk indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 34%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot sebesar 42,8%, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) bobotnya sebesar 13,3% dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan bobot sebesar 9,9%.

Adapun beberapa kendala yang terjadi yaitu terdiri dari :

- Kebijakan penataan ruang khususnya area bantaran dan sempadan sungai.
- Beban pencemar dari limbah domestik rumah tangga.
- Minimnya upaya pengendalian pencemaran air baik program ataupun kebijakan pengendalian pencemaran sungai lintas sektoral.
- Rendahnya curah hujan akibat fenomena el nino.
- Rendahnya curah hujan akibat fenomena el nino.
- Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
- Kebijakan penataan ruang yaitu minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan konservasi.
- Diperlukan OPD lain sebagai pengampu khususnya untuk IKA dikarenakan dominasi beban pencemar dari limbah domestik yang sebagian besar tugas dan fungsinya berada di DSDA, sedangkan DLH hanya melaksanakan pemantauan kualitas sungai dan pengawasan pada kegiatan/usaha.

- Tidak adanya kerjasama dengan provinsi Jawa Barat sebagai lokasi hulu sungai-sungai di Jakarta sedangkan pemulihan kualitas sungai memerlukan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir serta koordinasi yang kuat dengan Lembaga pengelola das yaitu BP DAS dan Lembaga pengelola koridor sungai BBWSCC. Berikut program pendukung terkait dengan pencapaian Indeks Kota Layak Huni:

Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024 (Rp)		Capaian (Rp)
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.470	13.778.904.342.076	90,44%
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	106.726.954.624	104.951.201.514	98,34%
	2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (anggaran pelaporannya/ perhitungan realisasinya, dari aktivitas Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon)	5.556.259.397	5.000.266.625	89.99%

Adapun Tindak lanjut untuk pencapaian Target IKLH pada Tahun 2024 yaitu akan dilakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait metodologi, pengambilan sampel dan rumusan perhitungan nilai.

1.3. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 guna guna tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon pada penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan Nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai baseline-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use*).

- 1) Inventarisasi emisi GRK untuk direct emission merujuk Guidelines Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC 2006 GL), dimana penghitungan CO₂ menggunakan pendekatan Tier-2 sedangkan CH₄ dan N₂O menggunakan pendekatan Tier-1. Pusdatin ESDM, dalam hal ini Lemigas dan Tekmira telah menetapkan faktor emisi lokal (Tier 2) untuk gas karbon dioksida pada beberapa jenis bahan bakar (BBM, batubara dan gas).
- 2) Perhitungan inventarisasi emisi GRK di sektor IPPU didapatkan dari adanya penggunaan bahan baku selama proses produksi di industri yang menghasilkan gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan produk (misalnya pelumas, paraffin, wax dan sebagainya) selama proses produksi di industri juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Terbentuknya gas di kedua kondisi tersebut dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor IPPU. Sedangkan penggunaan bahan bakar selama proses produksi di industri dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor energi. Pemisahan ini harus jelas agar penghitungan emisi GRK dilakukan agar tidak terjadi double counting.
- 3) Berdasarkan pedoman IPCC 2006, kategori peternakan (3A) dibagi ke dalam sub-kategori: fermentasi enterik (3A1) dan pengelolaan kotoran ternak (3A2). Data-data yang digunakan dalam proses kuantifikasi yang dilakukan yaitu bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Metodologi estimasi emisi dari sub-sektor peternakan.
- 4) Tingkat emisi GRK sektor limbah bergantung jumlah limbah yang dibuang/diolah, karakteristik limbah, dan proses pengolahan/pembuangan limbah. Perhitungan GRK berdasarkan metodologi dalam panduan IPCC 2006 dengan menggunakan metode FOD (First Order Decay). Namun ada beberapa parameter yang menggunakan parameter lokal, diantaranya komposisi sampah dan kandungan bahan kering (dry matter content).

Pada tahun 2024 tingkat persentase penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan yaitu sebesar 25.9%, dimana target pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan penyesuaian target dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi 25.4%.

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :

Tabel II-19
Capaian IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	25.4	25.9	101.97%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023 tingkat persentase penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan yaitu sebesar 25.4%, dimana target pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu 19.3%.

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :.

Tabel II-20
Target RPD Indikator “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
			2023		2024		2025	2026
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19.3	25.4	25.4	25.9	20.5	22.3

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun pada tahun 2022 belum dijadikan target, sehingga realisasi pada tahun 2023 sebesar 25.4 dengan capaian 131.61% tidak dapat diperbandingkan, indikator tersebut memiliki target pada dokumen Perjanjian kinerja yaitu 19.3 sesuai dengan target RPD Tahun 2023-2026, adapun target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 22.3.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 mempunyai program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, selain program tersebut ada beberapa rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan dan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.

Alokasi Anggaran untuk Perhitungan Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Rp. 1.982.121.782 Dengan Realisasi Rp. 1.975.469.477. dengan efisiensi anggaran sebesar 0,34 persen.adalah sebagai berikut:

Sasaran	No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2024 (Rp)		Capaian (%)
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
		Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	15.235.527.878.470	13.778.904.342.076	90,44%
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	106.726.954.624	104.951.201.514	98,34%
	2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (anggaran pelaporannya/ perhitungan realisasinya, dari aktivitas Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon)	5.556.259.397	5.000.266.625	89.99%

Target NDC dipandang dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia, di mana target tanpa syarat secara nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak

17.2% pada sektor kehutanan, 11% pada sektor energi, 0.32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor limbah.

Pada penurunan emisi gas rumah kaca terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih sulitnya mendapatkan data primer yang diampu oleh pengampu data Perangkat Daerah.

Kedepannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meng-arus-utama-kan target GRK 2030 dan 2050, DKI Jakarta berupaya memasukkan indikator penurunan GRK dalam perencanaan-perencanaan daerah jangka pendek, menengah maupun panjang. Melalui kegiatan inventarisasi dan pelaporan penurunan emisi GRK yang dilakukan tahun ini, telah dilakukan proyeksi tingkat emisi GRK dan penurunan emisi GRK periode 2023-2030 yang merupakan bagian dari hasil proyeksi target 2030 dan NZE 2050.

1.4. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah menghitung kemungkinan terjadinya bencana semakin kecil nilai IRB maka semakin kecil nilai terjadinya bencana. Tujuan dari IRB adalah untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia sehingga IRB merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan Risiko Bencana yang ada dan dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lainnya.

Terdapat 7 Prioritas pada pencapaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu :

- a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Indeks Resiko Bencana diperoleh dengan menghitung beberapa komponen penilaian yaitu :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI
1	Bahaya (<i>Hazard</i>)
2	Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)
3	Kapasitas (<i>Capacity</i>)

Rumus Indeks Risiko Bencana

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Hazard (Bahaya)} \times \text{Vulnerability (Kerentanan)}}{\text{Capacity (Kapasitas)}}$$

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) memiliki luas wilayah 1.671,83 km². DKI Jakarta memiliki struktur geologi yang terdiri dari endapan Pleistocene yang terdapat di +50 m di bawah permukaan tanah, sementara kondisi topografinya terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8m dpl. Sekitar 40% wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada pada 1-1,5m di bawah muka laut pasang. Secara klimatologi cuaca di Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam, dimana pada bulan Januari umumnya terjadi curah hujan tertinggi dan terendah pada bulan Juli dan Agustus.

Pada tahun 2022 Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 3 jenis bencana alam yang dominan terjadi di DKI Jakarta adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor. Indeks Resiko Bencana Tahun 2022 adalah 62,58. berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, sedangkan pada tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 61,31 (sedang).

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :

Tabel II-21
Capaian IKU Indeks Resiko Bencana

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Resiko Bencana	Indeks	59.66	N/A	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan Indeks IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 yaitu sebesar 1,27 dari tahun sebelumnya yaitu 61,31 (tetap dalam kategori sedang).

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Resiko Bencana	Indeks	60.12	61.31	59.66	N/A	59.16	58.72

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tabel II-22
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	IRB 2024
Kepulauan Seribu	43,50
Jakarta Selatan	49,75
Jakarta Timur	71,59
Jakarta Pusat	54,25
Jakarta Barat	67,76
Jakarta Utara	68,,89
Provinsi DKI Jakarta	57,29

Sumber IRBI 2024

Sehubungan dengan capaian nilai IRBI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ada beberapa Instansi terkait yang terlibat dalam pengisian indikator Ketahanan Daerah yaitu :

No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	11	Dinas Kesehatan	21	DKPKP
2	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	12	Dinas Pendidikan	22	Biro PLH
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13	NGO	23	Polda Metro
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	PMI	24	PDAM
5	Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	15	Satuan Polisi PP	25	BBWSCC
6	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geografi (BMKG)	16	Dinas Pemuda dan Olahraga	26	Dinas Sosial
7	Dinas Cipta Karya	17	Bulog		
8	Sekretariat Dewan DPRD	18	Dinas Perhubungan		
9	Dinas Lingkungan Hidup	19	PLN		
10	Dinas Sumber Daya Air	20	BUMD		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Adapun program yang mendukung pencapaian Indikator Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 di BPBD Provinsi DKI Jakarta yaitu :

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Nilai IKD dan IRB	1	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	100.248.433.446	97.037.314.337	96,80%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai IRBI tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 97.037.314.337 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 100.248.433.446 atau capaian sebesar 96,80% dari nilai total anggaran.

a. Sumber Daya Manusia

BPBD Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan sumber daya manusia dengan menempatkan personel sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan :

1) Rekrutmen tenaga ahli di bidang kebencanaan

a) BPBD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rekrutmen Tenaga Non ASN dengan Jumlah Petugas Penanganan Bencana Tahun 2024 sebanyak 267 orang

b) Petugas Penanganan Bencana tersebut bertugas di masing-masing kelurahan dengan posko di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Adapun tugas dari Petugas Penanganan Bencana ini adalah :

- Melaksanakan penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana di Daerah;
- Melaksanakan pengurangan risiko bencana di Wilayah;
- Melaksanakan penanganan bencana di Wilayah;
- Melaksanakan pemulihan dini bencana di Wilayah.

Untuk meningkatkan kapasitas petugas penanggulangan bencana sebanyak 267 orang BPBD bekerjasama dengan BNPB dan Bazarnas memberikan Bimbingan Teknis kepada Petugas Penanganan Bencana berupa :

- Peningkatan Kapasitas Pertolongan di Permukaan Air Bagi Petugas Penanganan Bencana
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Personil Dalam Penanganan Korban dan Pengungsi Akibat Bencana

Petugas P2B tersebut diturunkan ke setiap kelurahan untuk memberikan laporan dan pertolongan awal pada saat kejadian bencana di wilayah dengan cepat.

Pada kegiatan KIE, BPBD melalui 18 Tenaga Ahli Literasi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat pengunjung ruang literasi kebencanaan baik yang berasal dari anak sekolah dan masyarakat umum. Semakin banyaknya permintaan dari instansi/lembaga terkait sosialisasi kebencanaan.

BPBD juga melaksanakan rekrutmen PJLP untuk ditempatkan di Pusdatin sebanyak 60 Orang, dengan rincian Petugas Call Center sebanyak 33 orang, SO sebanyak 10 orang, Customer Relation 2 orang, Community Manager 10 orang, GIS 2 orang, Tenaga Kebersihan 2 orang, dan 1 orang SPV untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kebencanaan serta 6 Orang Tenaga Ahli.

- 2) BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai 57 ASN yang terbagi dalam 3 bidang, 1 unit, dan 1 sekretariat. Selain melaksanakan tugas sesuai fungsinya, ASN BPBD juga ditugaskan sebagai narasumber untuk memberikan informasi, edukasi dan sosialisasi terkait Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik dan Gedung, Pembinaan dan pendampingan serta simulasi sekolah/madrasah aman bencana, dan kegiatan lain. Untuk meningkatkan kapasitas para ASN tersebut sesuai dengan tupoksinya, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh K/L lain.
- 3) BPBD juga melakukan Rotasi dan promosi pegawai untuk menjaga motivasi dan kinerja dari ASN BPBD.

b. Sumber Daya Teknologi

BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dengan andalannya Layanan Jakarta Siaga 112/ Call Center 112 dan command Center. Beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan teknologi dalam penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas utama BPBD. Teknologi yang digunakan meliputi:

- 1) Sistem peringatan dini berbasis IoT (Internet of Things) untuk memantau potensi bencana.
- 2) Penggunaan drone untuk survei dan pemetaan area terdampak.
- 3) Integrasi data berbasis GIS untuk perencanaan dan analisis risiko bencana.
- 4) Aplikasi Siaga 112 dan Layanan Omnichannel Jakarta Siaga 112 merupakan inovasi layanan digital dari Jakarta Siaga 112 yang dapat diakses secara gratis melalui semua operator telepon, baik telepon seluler (dengan atau tanpa simcard), telepon rumah dan melalui Whatsapp di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5) Aplikasi Simba merupakan aplikasi utama yang digunakan di BPBD merupakan hasil pengolahan yang dilakukan oleh petugas yang bersumber dari informasi SKPD terkait, laporan masyarakat, lurah dan lain-lain serta dari pemantauan petugas piket di lapangan.

Selain itu BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Ruang Literasi Kebencanaan yang menggunakan teknologi simulasi gambaran kejadian bencana (VR). Pemafaatan teknologi (media sosial website dan lain-lain terkait dengan teknologi informasi).

Berikut capaian Nilai/Predikat IRBI seluruh Pemda tahun 2023 oleh BNPB secara Nasional diumumkan pada Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2024 :

NO	PROVINSI	IRBI 2022	IRBI 2023	STATUS	CAPAIAN
1	ACEH	149.10	146.90	▼	TURUN
2	SUMATERA UTARA	142.51	140.65	▼	TURUN
3	SUMATERA BARAT	144.39	144.38	▼	TURUN
4	RIAU	141.26	137.75	▼	TURUN
5	JAMBI	133.49	135.69	▲	NAIK
6	SUMATERA SELATAN	132.99	131.24	▼	TURUN
7	BENGKULU	155.35	148.75	▼	TURUN
8	LAMPUNG	142.55	135.66	▼	TURUN
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	158.52	155.61	▼	TURUN
10	KEPULAUAN RIAU	110.93	107.79	▼	TURUN
11	DKI JAKARTA	62.58	61.31	▼	TURUN
12	JAWA BARAT	131.62	123.16	▼	TURUN
13	JAWA TENGAH	115.38	109.01	▼	TURUN
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	119.56	108.15	▼	TURUN
15	JAWA TIMUR	121.70	118.61	▼	TURUN
16	BANTEN	144.51	132.21	▼	TURUN
17	BALI	123.98	120.21	▼	TURUN
18	NUSA TENGGARA BARAT	119.83	115.37	▼	TURUN
19	NUSA TENGGARA TIMUR	139.23	132.81	▼	TURUN
20	KALIMANTAN BARAT	136.72	138.92	▲	NAIK
21	KALIMANTAN TENGAH	123.56	121.72	▼	TURUN
22	KALIMANTAN SELATAN	128.81	129.44	▲	NAIK
23	KALIMANTAN TIMUR	146.67	144.43	▼	TURUN
24	KALIMANTAN UTARA	157.47	148.16	▼	TURUN
25	SULAWESI UTARA	129.62	128.01	▼	TURUN
26	SULAWESI TENGAH	143.44	140.56	▼	TURUN
27	SULAWESI SELATAN	150.07	144.47	▼	TURUN
28	SULAWESI TENGGARA	155.29	153.08	▼	TURUN
29	GORONTALO	120.61	116.71	▼	TURUN
30	SULAWESI BARAT	165.23	160.08	▼	TURUN
31	MALUKU	162.47	160.03	▼	TURUN
32	MALUKU UTARA	149.22	148.71	▼	TURUN
33	PAPUA	138.27	138.59	▲	NAIK
34	PAPUA BARAT	143.92	145.76	▲	NAIK
35	PAPUA SELATAN	138.20	138.20	▬	TETAP
36	PAPUA TENGAH	116.30	116.49	▲	NAIK
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.05	102.05	▬	TETAP
38	PAPUA BARAT DAYA	150.31	148.44	▼	TURUN

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat Indeks Resiko Bencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain:

No	Hambatan	Tindak Lanjut
1	Melibatkan SKPD terkait sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif dalam pemenuhan 71 indikator. Hal ini memperlambat terselesaikannya pemenuhan target	Mengadakan Focus Group Discussion, Rapat koordinasi antar SKPD
2	Proses pembuatan kebijakan yang membutuhkan waktu lama	Lebih proaktif dalam proses penyusunan kebijakan (Proses Perbal)

Guna memperbaiki nilai/predikat IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2024	Target
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2023 - 2027	Peraturan Gubernur Rencana Penanggulangan Bencana 2023 - 2027 sampai pengesahannya
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana)
3	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pembentukan Peta Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD 2022	Peta kapasitas penanggulangan bencana tingkat Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
4	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis JITUPASNA untuk Aparatur	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA)
5	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Penyusunan Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.2 Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tujuan kedua ini yaitu 'Perekonomian Inklusif', 'Daya Saing', 'Penghidupan Layak' dan 'Pemerataan Kesejahteraan'. Perekonomian inklusif merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran 'Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah'. Kata kunci selanjutnya yaitu terkait daya saing, mengadopsi *global competitiveness index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata

kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran V-327 'Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi'. Kata kunci berikutnya terkait penghidupan layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha, maupun resiliensi tenaga kerja terhadap tantangan. Untuk mencapai hal tersebut dirumuskan sasaran 'Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja'. Kata kunci terakhir yaitu pemerataan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan, sehingga dirumuskan sasaran 'Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial'. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel II-23
Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks pembangunan ekonomi inklusif	Indeks	7.81	8.20	104.99%
Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi	persen	4.80 – 5.6	4.90	100%
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6.53	6.21	105.15%
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan	Tingkat Kemiskinan	persen	3.79	4.14	91.55%
	Rasio gini	Koefisien	0.410	0.431	95.13%
	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	0.5	0.35	142.86%
Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks daya saing daerah	Persen	4.01	N/A	-

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan tujuan/sasaran dari Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu 7,81 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir pada tahun 2023 oleh Bappenas mempunyai nilai Capaian sebesar 8,20 poin atau kategori sangat memuaskan, sehingga pada tahun 2024 nilai capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat dibandingkan dengan target.

Tabel II-24
Capaian IKU Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7.81	8.20 (Tahun 2023)	-

Sumber: Bappenas

Ket: Skala 1-3 = kurang memuaskan, 4-7 = memuaskan, 8-10 = sangat memuaskan

***menggunakan data terakhir tahun 2023, untuk data tahun 2024 belum dirilis Bappenas**

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif terpenuhi namun masih menggunakan data terakhir Bappenas tahun 2023. Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7.69	7.93 (data 2021)	7.81	8.20 (data 2023)	7.93	8.04

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan target pada tabel di atas Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada target akhir mempunyai nilai/indeks sebesar 7,81 poin. Sehingga Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menurut data terakhir Tahun 2023 sebesar 8,20 sudah tercapai. Namun untuk data capaian tahun 2024 belum dirilis oleh Bappenas. Berikut capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif peringkat 1 s.d. 3 tertinggi seluruh Indonesia serta capaian nasional tahun 2023 oleh Bappenas yang dirilis pada *website* Bappenas:

No	Pemda	Indeks 2023*
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	8,20
2	Pemerintah Provinsi Bali	7,04
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7,00
	Indonesia	6,17

Sumber : Bappenas (<https://inklusif.bappenas.go.id/data>)

Keterangan: * menggunakan data terakhir tahun 2023, untuk data tahun 2024 belum dirilis Bappenas

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

No	Indikator Keberhasilan	Keterangan																																				
1	Pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, pilar 3. Perluasan Akses dan Kesempatan, dan sub-Pilar 3.1. Kapabilitas Manusia. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Salah satu indikator yang digunakan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta tahun 2024 sebesar 13,51 tahun. <table><tr><th>Kota/Kabupaten</th><th colspan="3">Harapan Lama Sekolah (Tahun)</th></tr><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Kabupaten Kepulauan Seribu</td><td>12,65</td><td>12,66</td><td>12,67</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Selatan</td><td>13,35</td><td>13,66</td><td>13,94</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Timur</td><td>13,97</td><td>14,06</td><td>14,07</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Pusat</td><td>13,28</td><td>13,29</td><td>13,31</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Barat</td><td>12,82</td><td>12,87</td><td>13,14</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Utara</td><td>12,66</td><td>12,67</td><td>12,70</td></tr><tr><td>DKI Jakarta</td><td>13,08</td><td>13,33</td><td>13,51</td></tr></table> Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2024 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024)	Kota/Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				2022	2023	2024	Kabupaten Kepulauan Seribu	12,65	12,66	12,67	Kota Jakarta Selatan	13,35	13,66	13,94	Kota Jakarta Timur	13,97	14,06	14,07	Kota Jakarta Pusat	13,28	13,29	13,31	Kota Jakarta Barat	12,82	12,87	13,14	Kota Jakarta Utara	12,66	12,67	12,70	DKI Jakarta	13,08	13,33	13,51	• Pada tahun 2024, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan di Kota Jakarta Timur diharapkan dapat bersekolah selama 14,07 tahun atau diperkirakan dapat masuk ke Diploma Dua, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 12,67 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Satu. • Kelima kota memiliki HLS yang cukup merata. Pada tahun 2024, Disparitas HLS antara Kota Jakarta Timur dengan HLS tertinggi dan Kabupaten kepulauan Seribu dengan HLS terendah sekitar 1,40 tahun. • Dilihat dari sisi pertumbuhan HLS, selama periode tahun 2022-2024 berturut-turut dari yang tertinggi adalah Kota Jakarta Selatan sebesar 0,59 persen diikuti oleh Kota Jakarta Barat sebesar 0,32 persen, Kota Jakarta Timur sebesar 0,10 persen, Kota Jakarta Utara 0,04 persen, Kota Jakarta Pusat 0,03 persen, dan Kabupaten Kepulauan Seribu 0,02 persen.
Kota/Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)																																					
	2022	2023	2024																																			
Kabupaten Kepulauan Seribu	12,65	12,66	12,67																																			
Kota Jakarta Selatan	13,35	13,66	13,94																																			
Kota Jakarta Timur	13,97	14,06	14,07																																			
Kota Jakarta Pusat	13,28	13,29	13,31																																			
Kota Jakarta Barat	12,82	12,87	13,14																																			
Kota Jakarta Utara	12,66	12,67	12,70																																			
DKI Jakarta	13,08	13,33	13,51																																			
Kendala		Keterangan																																				
Data tidak tersedia untuk tahun 2024. Data terakhir dirilis oleh Bappenas untuk Indeks tahun 2023.		https://inklusif.bappenas.go.id/data																																				

Guna meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mempunyai beberapa prioritas pembangunan yang terdiri dari

No	Kegiatan	Prioritas Pembangunan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025		
1.	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dengan fokus utama transformasi ekonomi (<i>green economy, blue economy, gig economy, digitalization</i>), pengembangan riset dan inovasi, peningkatan daya tarik pariwisata, iklim investasi, serta penciptaan dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus utama percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan, optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan	Dimensi/Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
		Economic: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Peningkatan Kesenjangan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah Pengurangan Ketimpangan	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (<i>Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization</i>) 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi 3. Peningkatan Investasi Daerah 4. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui <i>Cultural Interaction</i> 5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
		Human: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan Memorannya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting 3. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan 4. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 6. Penguatan Ketahanan Pangan

2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tujuan dari terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,8% – 5,6% yang telah

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir BPS sampai dengan triwulan IV-2024 mempunyai nilai capaian sebesar 4,90% (*cummulative-to-cummulative*).

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,8 – 5,6	4,90

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
Realisasi Inflasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis Badan Pusat Statistik, dengan rumus perhitungan:

$$r = \{Y_{it} \times 100 / Y_{i(t-1)}\} - 100.$$

Keterangan: r = Laju pertumbuhan ekonomi (%).

Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)

$Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi triwulan I s.d. triwulan IV-2024 telah mencapai target. Sasaran Indikator kinerja utama pada Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu:

Tabel II-25
Capaian RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.40-6.20	4.96	4,8–5,6	4,90	5.60-6.40	5.60-6.40

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan target pada tabel di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi pada target akhir 2024 mempunyai Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,40% – 6,20%. Sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut data terakhir BPS triwulan I-2024 s.d. triwulan IV-2024 sebesar 4,90% belum tercapai.

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir BPS sampai dengan triwulan IV-2024 mempunyai nilai capaian sebesar 4,90% (*cummulative-to-cummulative*).

Berikut capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dirilis terakhir oleh BPS pada Februari 2024 adalah:

Tabel II-26
Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2024	Jakarta	Indonesia
1	Q to Q (<i>Quarter-to-Quarter</i>)	2,68%	0,53%
2	YoY (<i>Year-on-Year</i>)	5,01%	5,02%
3	C to C (<i>Cummulative-to-Cummulative</i>)	4,90%	5,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

Tabel II-27
Faktor Keberhasilan

Indikator Keberhasilan	Keterangan
a. Konsumsi (C) Rumah Tangga: upaya pemberian berbagai bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta, KJP Plus, Program Pangan Bersubsidi, dll, dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat konsumsi, yang pada akhirnya menggerakkan perekonomian. b. Investasi (I): Kondisi ekonomi yang stabil, kebijakan pro-investasi, dan kestabilan politik dapat meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis sehingga mendorong investasi perusahaan. c. Pengeluaran Pemerintah (G): Penggunaan APBD untuk belanja publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. d. Net Ekspor (X-M): upaya promosi produk-produk UMKM yang telah dikurasi dan difasilitasi berbagai izin dan sertifikasi, serta dukungan pemasaran di berbagai event internasional turut berdampak terhadap kegiatan ekspor barang produk UMKM	</

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Tabel II-28
Faktor Penghambat

Kendala	Keterangan
Perekonomian Jakarta menghadapi tantangan eksternal dan internal, karena hal-hal di luar kendali Pemerintah Daerah. Dari sisi eksternal seperti tingginya ketidakpastian dan melambatnya perekonomian global yang disebabkan kondisi geopolitik-ekonomi yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi global melambat. Faktor-faktor geopolitik-ekonomi diantaranya seperti berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina. Terpilihnya Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) juga berdampak negatif pada memburuknya kondisi pasar keuangan global pada triwulan-IV 2024. Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral khususnya di negara maju, seperti AS, untuk mengatasi inflasi dengan meningkatkan suku bunga terutama pada 3 triwulan pertama, sehingga menarik aliran modal di negara berkembang. Faktor-faktor tersebut memengaruhi perekonomian nasional dan Jakarta. (Sumber: Laporan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024). Ketergantungan Jakarta pada perdagangan internasional dan investasi asing dapat terganggu oleh fluktuasi harga komoditas global dan kebijakan proteksionisme negara-negara besar, yang bisa mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan ekonomi kota ini. Selain itu, globalisasi yang semakin cepat memperkenalkan tantangan baru dalam menghadapi teknologi dan ekonomi digital yang mendisrupsi sektor tradisional. Di sisi internal, tantangan pembangunan Jakarta fokus untuk mengurangi ketimpangan sosial dan infrastruktur yang belum merata. Pendanaan proyek infrastruktur yang terbatas juga menjadi hambatan utama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta untuk memfasilitasi urbanisasi yang terus berkembang.	-

Untuk tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah masih adanya berbagai tantangan dan risiko, penguatan perekonomian Jakarta serta meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

- a. Penguatan Peran Jakarta sebagai lokomotif utama perekonomian nasional melalui:

- 1) Optimalisasi sektor ekonomi utama, termasuk mendorong hilirisasi dan mendorong iklim investasi;
 - 2) Pengembangan sektor potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru
- b. Penguatan sinergi pengendalian inflasi:
- 1) Penguatan program TPID Jakarta dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); guna mendukung pencapaian target inflasi 2025 sebesar $2,5\% \pm 1\%$
 - 2) Sinergi dengan TPID Jabodetabek melalui manajemen pengelolaan *supply-demand* untuk komoditas yang memiliki bobot besar terhadap inflasi
- c. Penguatan ekosistem digital melalui penguatan sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk sektor Pemerintah dan sektor swasta, termasuk UMKM

Untuk optimalisasi sektor utama dan pengembangan sektor potensial, strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Peningkatan sinergi dan kerja sama
Peningkatan sinergi dan kerja sama perlu dilakukan dengan melibatkan penguatan kerja sama yang sudah ada dan pengembangan kerja sama dengan mitra baru. Kerja sama yang erat antara sektor-sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pertumbuhan, dan menciptakan lingkungan usaha yang berdaya saing.
- 2) Penguatan regulasi dan business environment
Regulasi yang jelas dan mendukung serta lingkungan bisnis yang kondusif akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang efisien dan perbaikan kebijakan bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pelaku usaha.
- 3) Perluasan implementasi digital
Penerapan teknologi digital juga menjadi elemen kunci dalam strategi pengembangan ekonomi. Dengan memanfaatkan

teknologi digital dalam kegiatan produksi dan promosi, sektor ekonomi dapat meningkatkan daya saingnya.

4) Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar

Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar, terutama sebagai megapolitan Jabodetabek, dapat memperluas peluang kerja sama dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat. Kerja sama lintas daerah dapat meningkatkan konektivitas, pertukaran sumber daya, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 52/11/31/Th.XXVI, 05 November 2024 tentang Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (periode Agustus) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar 6,21%, penurunan TPT dipengaruhi oleh Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Meningkatnya TKK menunjukkan bahwa terjadi penyerapan atau penambahan tenaga kerja yang bekerja, dimana penduduk bekerja bertambah sebanyak 35 ribu orang dibandingkan dengan agustus 2023 dengan penambahan tenaga kerja terbesar pada penyediaan akomodasi dan makan minum (Penduduk bekerja di sektor ini meningkat 27 ribu orang).

Tabel II-29
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	6.53	6,21	105.15%

Sumber : Dinas Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Realisasi tahun 2024 terhadap Sasaran Indikator kinerja utama pada Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024	Target	
			Target	Real	Target	Real	2025 2026
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	6.53	6,21	7.61 7.31

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Apabila dibandingkan dengan target RPD pada Tahun 2024, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka telah melebihi dari target yang diharapkan dengan nilai TPT Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,53 persen. Tentunya, kinerja ini perlu dipertahankan dan diharapkan upaya-upaya dalam penurunan Tingkat pengangguran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi kondisi pengangguran di DKI Jakarta dengan baik, dan serta menurunkan Tingkat pengangguran pada periode-periode berikutnya. Dalam mendukung pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2024, terdapat beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Adapun untuk lingkup ketenagakerjaan, program-program tersebut antara lain:

Indikator	Program	Anggaran 2024	Realisasi s/d 31 Des 2024	Capaian Anggaran
Tingkat pengangguran terbuka (periode agustus) tahun 2024	Program perencanaan tenaga kerja	205.906.090	188.029.040	91,32%
	Program penempatan tenaga kerja	30.225.467.429	29.471.129.199	97,94%
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	105.760.383.117	103.442.917.581	97,00%
	Program hubungan industrial	2.089.165.000	2.087.310.000	99,84%
	Program pengawasan ketenagakerjaan	3.677.518.676	3.604.240.890	99,01%
	Total	141.958.440.312	138.793.626.710	97,35%

Terdapat beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024, antara lain:

a. Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri

Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 3.501 orang.

b. Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan Bazar

Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 15 kali kegiatan dan 1 kali kegiatan Job Fair tingkat Provinsi.

c. Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan dan MTU

Kegiatan ini dilakukan di 7 Pusat Pelatihan Kerja Volume Total Peserta Pelatihan 8.072 Orang.

d. Pelatihan SIM A

Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 2.690 Orang.

e. Pelatihan Satuan Pengamanan

Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 330 Orang.

f. Pelatihan Kejuruan di Pulau Seribu

Kegiatan ini dilakukan di Sudin TKTE Pulau Seribu dengan output pencari kerja yang dilatih kejuruan Bahasa Inggris, Operator Komputer, Teknik Pendingin, dan Kolaborasi Pelatihan Las Bawah Air dengan total volume 98 Orang.

g. Pelatihan Peningkatan Produktivitas

Kegiatan ini dilakukan UPT Pusat Pembangan Produktivitas Daerah dengan volume 700 Orang.

Berikut capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (periode Agustus) Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Berita Resmi Statistik No. 52/11/31/Th.XXVI, 05 November 2024 tentang Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2024.

Tabel II-30
Komparasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional

Provinsi	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,17	6,59	6,30	6,17	6,00	5,75
Sumatera Utara	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Sumatera Barat	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
Riau	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23	3,70
Jambi	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,48
Sumatera Selatan	4,53	5,01	4,98	4,63	4,11	3,86
Bengkulu	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11
Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19
Kepulauan Bangka Belitung	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63
Kepulauan Riau	7,30	10,34	9,91	8,23	6,80	6,39
DKI Jakarta	6,54	10,95	8,50	7,18	6,53	6,21
Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
D.I. Yogyakarta	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69	3,48
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88	4,19
Banten	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68
Bali	1,57	5,63	5,37	4,80	2,69	1,79
Nusa Tenggara Barat	3,28	4,22	3,01	2,89	2,80	2,73
Nusa Tenggara Timur	3,14	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
Kalimantan Barat	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05	4,86
Kalimantan Tengah	4,04	4,58	4,53	4,26	4,10	4,01
Kalimantan Selatan	4,18	4,74	4,95	4,74	4,31	4,20
Kalimantan Timur	5,94	6,87	6,80	5,71	5,31	5,14
Kalimantan Utara	4,49	4,97	4,58	4,23	4,01	3,90
Sulawesi Utara	6,00	7,37	7,06	6,61	6,10	5,85
Sulawesi Tengah	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95	2,94
Sulawesi Selatan	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33	4,19
Sulawesi Tenggara	3,52	4,58	3,92	3,56	3,15	3,09
Gorontalo	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13
Sulawesi Barat	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27	2,68
Maluku	6,69	7,57	6,93	6,88	6,31	6,11
Maluku Utara	4,83	5,15	4,71	3,98	4,31	4,03
Papua Barat	6,43 ¹	6,80 ²	5,84 ³	5,37 ⁴	4,18	4,13
Papua Barat Daya					6,58	6,48
Papua					6,90	6,48
Papua Selatan					3,38	4,05
Papua Tengah	3,51 ¹	4,28 ¹	3,33 ²	2,83 ²	2,13	2,75
Papua Pegunungan					1,02	1,32
Indonesia	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Berdasarkan data Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dan nasional, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta (6,21%) masih diatas nilai rata-rata Tingkat Pengangguran Nasional (4,91%). Namun demikian, Perkembangan penurunan TPT Provinsi DKI Jakarta menunjukan tren positif dengan perubahan Tingkat pengangguran yang cukup besar dari tahun ke tahun. Adapun faktor keberhasilan/kendala yang ada terhadap indikator Penurunan TPT Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 hingga 6,21% merupakan refleksi positif bahwa perkembangan perekonomian DKI Jakarta disertai dengan berbagai kebijakan

pendukung pada berbagai sektor seperti investasi & lapangan usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan penurunan TPT adalah sinergi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan stakeholder lainnya dalam Pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif menjalin berbagai kolaborasi dengan berbagai lintas stakeholder seperti instansi pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan NGO melalui berbagai skema kerja sama atau MoU untuk menjamin program dan kebijakan ketenagakerjaan dapat berdampak positif kepada masyarakat. Berbagai upaya tersebut disertai dengan sinergi kebijakan pada sektor lainnya melalui pembangunan holistik oleh Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat mewujudkan penanganan pengangguran secara efektif.

Di sisi lain, Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai kendala/hambatan dalam lingkup ketenagakerjaan yang diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	KENDALA/HAMBATAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	• Berkurangnya Pegawai Fungsional tertentu diantaranya Fungsional Pengantar Kerja, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Instruktur di Pusat Pelatihan Kerja yang berpotensi menghambat kinerja untuk mendukung Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka • Laju pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja. • Ketidak-sesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan; • Informasi kesempatan kerja belum sepenuhnya diketahui oleh para pencari kerja. • Masih relatif rendahnya tingkat produktivitas pencari kerja serta kurangnya pemahaman kewirausahaan.

Sebagai upaya untuk terus menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka merealisasikan target, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi dalam lingkup ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) yakni:

SASARAN STRATEGIS	RENCANA KE DEPAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	• Dari segi infrastruktur, telah dibangun Command Centre serta website yang akan digunakan untuk memonitor data pencari kerja dan peserta pelatihan agar dapat lebih efektif dalam proses penyaluran pencari kerja tersebut menjadi pekerja. Pembentukan website diharapkan mempermudah perluasan informasi pasar kerja (lowongan kerja) kepada pencari kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam mendukung infrastuktur serta pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat, akan dibangun system informasi dan layanan ketenagakerjaan yang komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. • Pemutakhiran sarana dan prasarana pelatihan kerja sehingga kualitas peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. • Pelaksanaan pameran kesempatan kerja/job fair baik pada Tingkat Kabupaten/Kota ataupun Tingkat Provinsi. Selain itu, direncanakan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja yang dikhususkan untuk tenaga kerja tertentu dalam rangka mendukung penyerapan tenaga kerja antara lain: Job Fair khusus penyandang disabilitas, serta Job Fair pada Lembaga Pendidikan (SMK dan Perguruan Tinggi). • Pelaksanaan dan peningkatan kolaborasi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) tingkat SMK dan Perguruan Tinggi sebagai salah satu Lembaga penempatan di tingkat satuan Pendidikan dalam bentuk pemberian pembinaan kelembagaan, jejaring pasar kerja yang langsung mempertemukan dengan perusahaan, mendukung terselenggaranya job fair di BKK dengan memfasilitasi Perusahaan yang ikut serta. • Peningkatan kolaborasi dengan pelaksana penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri dalam bentuk pemberian pembinaan terkait penempatan tenaga kerja, kerja sama rekrutmen bersama, walk in interview, penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan, hingga penempatan lulusan PPKD ke mitra LPTKS baik untuk tenaga kerja umum maupun tenaga kerja peyandang disabilitas.

SASARAN STRATEGIS	RENCANA KE DEPAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	- Pemberian pembinaan kepada calon pencari kerja untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja mulai dari penggalan potensi minat dan bakat, pembuatan CV, surat lamaran, tips interview, informasi ketenagakerjaan terkini, informasi jabatan dan sebagainya dengan mengajak langsung tim dari Kementerian Ketenagakerjaan RI serta dari sektor swasta. - Peningkatan perluasan kesempatan kerja di sektor informal melalui program Tenaga Kerja Mandiri (Jakpreneur) yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas seperti pembinaan pembangunan merk produk, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan.

2.3 Rasio Gini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mempunyai target koefisien 0,41. Adapun indikator gini ratio ini merupakan salah satu indikator dari sasaran “berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial”.

Tabel II-31
Capaian Indikator Rasio Gini

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Rasio Gini	Persen	0.41	0.431	95.13%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Meskipun tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2024 menurun, namun terjadi kenaikan ketimpangan pengeluaran (gini rasio), yang berarti gap pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin tinggi. Kenaikan ketimpangan ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di semua kelompok masyarakat.

Tabel II-32
Gini Rasio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Uraian	Maret 2024	September 2024	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gini Rasio	0,423	0,431	0,008
Distribusi Pengeluaran			
• 40% Bawah	16,71	16,15	-0,57
• 40% Tengah	32,63	32,71	0,08
• 20% Atas	50,66	51,14	0,48

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Distribusi pengeluaran penduduk September 2024 menunjukkan bahwa pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin menjadi sebesar 16,15 persen dibandingkan Maret 2024. Menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di DKI Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Gini Ratio pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Tabel II-33
Data Capaian Realisasi 2024 Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan, terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Gini Ratio	Koefisien	0,411	0,431	0,410	0,431	0,410	0,409

Sumber : Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Pada September 2024 berdasarkan data statistik demografi dan sosial BPS, yang diperbaharui pada tanggal 15 Januari 2025, provinsi dengan Gini Ratio tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,431. Sementara itu, provinsi dengan Gini Ratio terendah tercatat di Kep. Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,235. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang terbesar 0,431; terdapat empat provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,428), DI Yogyakarta (0,428) dan Papua Selatan (0,424). Berikut data Gini Rasio pada 38 Provinsi seluruh Indonesia.

Tabel II-34 Gini Ratio menurut provinsi, Semester 2 September 2024

38 Provinsi	Ratio Gini Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan+Perdesaan 2024		
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Tahunan
ACEH	0,294	0,294	-
SUMATERA UTARA	0,297	0,306	-
SUMATERA BARAT	0,283	0,287	-
RIAU	0,307	0,306	-
JAMBI	0,321	0,315	-
SUMATERA SELATAN	0,333	0,331	-
BENGKULU	0,342	0,343	-
LAMPUNG	0,302	0,301	-
KEP. BANGKA BELITUNG	0,244	0,235	-
KEP. RIAU	0,349	0,357	-
DKI JAKARTA	0,423	0,431	-
JAWA BARAT	0,421	0,428	-
JAWA TENGAH	0,367	0,364	-
DI YOGYAKARTA	0,435	0,428	-
JAWA TIMUR	0,372	0,373	-
BANTEN	0,353	0,359	-
BALI	0,361	0,348	-
NUSA TENGGARA BARAT	0,361	0,364	-
NUSA TENGGARA TIMUR	0,316	0,316	-
KALIMANTAN BARAT	0,31	0,314	-
KALIMANTAN TENGAH	0,301	0,304	-
KALIMANTAN SELATAN	0,302	0,298	-
KALIMANTAN TIMUR	0,321	0,31	-
KALIMANTAN UTARA	0,264	0,259	-
SULAWESI UTARA	0,36	0,347	-
SULAWESI TENGAH	0,301	0,309	-
SULAWESI SELATAN	0,363	0,36	-
SULAWESI TENGGARA	0,37	0,365	-
GORONTALO	0,414	0,413	-
SULAWESI BARAT	0,354	0,33	-
MALUKU	0,282	0,291	-
MALUKU UTARA	0,316	0,296	-
PAPUA BARAT	0,389	0,385	-
PAPUA BARAT DAYA	0,346	0,347	-
PAPUA	0,362	0,405	-
PAPUA SELATAN	0,404	0,424	-
PAPUA TENGAH	0,381	0,355	-
PAPUA PEGUNUNGAN	0,34	0,346	-
INDONESIA	0,379	0,381	-

Sumber : BPS.go.id

2.3.1 Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 06/01/31/Th.XXVII, 15 Januari 2025 mempunyai target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 3,79

Tabel II-35 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	Persen	3.79	4,14	91.55

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Angka kemiskinan September 2024 kembali turun setelah mengalami kenaikan akibat dampak pandemi COVID-19. Angka kemiskinan pada September 2024 sebesar 4,14 persen atau turun 0,16 persen poin dibandingkan Maret 2024 sebesar 4,3 persen. Apabila dibandingkan dengan Maret 2021 pada saat angka kemiskinan mengalami kenaikan tertinggi yaitu sebesar 4,72 persen, angka kemiskinan September 2024 menurun sebesar 0,58 persen poin. Namun demikian angka kemiskinan September 2024 masih lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan sebelum pandemi COVID-19 yaitu September 2019 yang sebesar 3,42 persen. Tren penurunan angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir menjadi momentum keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan.



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada tingkat kemiskinan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut

Tabel II-36 Data capaian realisasi 2024 berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	Persen	4.13	4.44	3.79	4.14		

Sumber : Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Pemerintah Provinsi dalam menurunkan tingkat kemiskinan memiliki beberapa program yang mendukung diantaranya adalah :

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	1	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	20.040.286.275	18.439.597.860	92,01%
			Program Rehabilitasi Sosial	31.114.090.824	30.111.620.414	96,78%
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	694.156.782.883	665.118.910.705	95,82%
	2	DPPAPP	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	3.776.944.196	3.454.313.864	91%
	3	Dinkes	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.269.756.738.589	2.235.010.097.084	98,47%
	TOTAL			3.018.844.842.767	2.952.134.539.927	97,79%

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Tingkat Kemiskinan tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp.2.952.134.539.927 dari total pagu anggaran sebesar Rp.3.018.844.842.767 atau capaian sebesar 97,79% dengan capaian efisiensi sebesar 2,21% dari nilai total anggaran.

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, terdapat Sub Kegiatan **Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa** yang berkaitan langsung dengan peningkatan indikator kinerja sesuai dengan Strategi Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 2.235.010.097.084,- atau 96,63% dari total anggaran Rp. 2.269.756.738.589,-

Dari total anggaran pada program tersebut, terdapat anggaran yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan yaitu terkait dengan kontribusi iuran bagi peserta JKN PBI JK yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah disebutkan bahwa kontribusi Pemerintah Daerah dalam Membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kontribusi Iuran Peserta PBI adalah pembayaran Pemerintah Provinsi kepada BPJS Kesehatan atas sebagian iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, pembayaran kontribusi iuran ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

Adapun anggaran pembayaran kontribusi iuran tersebut untuk 1.500.000 orang adalah sebesar Rp. 39.600.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 33.380.307.300 (84,29%) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.264.406 jiwa.

Selain didukung dengan program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Penanggulangan Kemiskinan dengan renaksi berupa Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat. Kriteria keberhasilan dari renaksi tersebut yang diampu oleh Dinas Kesehatan adalah tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat dengan target berupa laporan progress pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat yang di dalamnya juga mencakup sasaran kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024, capaian untuk KSD tersebut adalah 100% dimana sudah ada laporan progress dari pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang yang dikirimkan secara rutin setiap triwulan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta.

Selain didukung dengan program-program yang ada diatas, terdapat beberapa rencana aksi yaitu :

1. Pedoman pendampingan dan pembinaan keluarga wirausaha
2. Pedoman penyediaan layanan aduan dan fasilitasi keluarga wirausaha
3. Panduan pembinaan, dan pembentukan karakter bagi pembangunan ketahanan keluarga melalui wirausaha berbasis keluarga

4. Pedoman pembinaan pendidikan dan campaign kesadaran akan ketahanan budaya sosial, tata tertib kehidupan bermasyarakat, kreativitas masyarakat dalam berekonomi, dan program-program sadar Kesehatan
5. Konsep penyaluran bantuan bagi pemenuhan kebutuhan layanan dasar keluarga miskin oleh lembaga pusat perubahan pada penduduk yang terdapat di lingkungan sekitarnya
6. Pembinaan dan Pengembangan UMKM
7. Peningkatan UMKM Naik Kelas
8. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan capaian Tingkat Kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Terkait dengan penggunaan sumber daya guna anggaran, teknologi, sarana dan SDM guna menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem yaitu selaras dengan renaksi yang telah dilakukan diatas.

Berdasarkan dengan data BPS pusat:

Tabel II-37
Perbandingan secara nasional Indikator Tingkat Kemiskinan

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24
ACEH	9.60	8.37	16.75	14.99	14.23	12.64
SUMATERA UTARA	7.93	7.01	8.08	7.44	7.99	7.19
SUMATERA BARAT	4.72	4.16	7.28	6.79	5.97	5.42
RIAU	6.76	6.11	6.61	6.52	6.67	6.36
JAMBI	9.50	9.60	5.90	6.08	7.10	7.26
SUMATERA SELATAN	10.04	9.02	11.53	11.43	10.97	10.51
BENGKULU	13.56	12.32	13.56	12.63	13.56	12.52
LAMPUNG	8.18	7.91	11.97	12.04	10.69	10.62
KEP. BANGKA BELITUNG	3.39	4.09	6.17	6.49	4.55	5.08
KEP. RIAU	4.85	4.36	9.94	8.55	5.37	4.78
DKI JAKARTA	4.30	4.14	-	-	4.30	4.14
JAWA BARAT	7.07	6.65	9.07	8.85	7.46	7.08
JAWA TENGAH	9.71	8.83	11.34	10.45	10.47	9.58

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24	Mar'24	Sep'24
DI YOGYAKARTA	10.29	10.11	12.49	11.31	10.83	10.40
JAWA TIMUR	7.12	6.83	13.30	13.19	9.79	9.56
BANTEN	5.69	5.57	6.44	6.20	5.84	5.70
BALI	3.55	3.32	5.20	5.11	4.00	3.80
NUSA TENGGARA BARAT	12.86	11.64	12.95	12.21	12.91	11.91
NUSA TENGGARA TIMUR	8.57	8.11	23.41	23.02	19.48	19.02
KALIMANTAN BARAT	4.25	4.62	7.58	7.26	6.32	6.25
KALIMANTAN TENGAH	4.89	5.22	5.38	5.29	5.17	5.26
KALIMANTAN SELATAN	3.62	3.59	4.61	4.46	4.11	4.02
KALIMANTAN TIMUR	4.47	4.41	8.76	8.00	5.78	5.51
KALIMANTAN UTARA	4.73	5.07	9.23	5.96	6.32	5.38
SULAWESI UTARA	4.75	4.07	10.35	10.14	7.25	6.70
SULAWESI TENGAH	8.61	7.34	13.33	12.90	11.77	11.04
SULAWESI SELATAN	5.08	5.21	10.74	10.11	8.06	7.77
SULAWESI TENGGARA	7.45	6.78	13.60	13.07	11.21	10.63
GORONTALO	4.57	4.99	22.97	21.62	14.57	13.87
SULAWESI BARAT	9.29	8.33	11.70	11.32	11.21	10.71
MALUKU	5.14	4.59	24.43	25.08	16.05	15.78
MALUKU UTARA	6.12	6.27	6.41	5.93	6.32	6.03
PAPUA BARAT	8.17	9.50	27.68	26.34	21.66	21.09
PAPUA BARAT DAYA	8.51	8.03	27.78	25.90	18.13	16.95
PAPUA	6.33	5.93	33.67	36.57	17.26	18.09
PAPUA SELATAN	3.10	3.65	25.64	28.47	17.44	19.35
PAPUA TENGAH	4.32	5.27	37.98	34.86	29.76	27.60
PAPUA PEGUNUNGAN	16.56	12.11	34.21	31.00	32.97	29.66
INDONESIA	7.09	6.66	11.79	1.34	9.03	8.57

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat tingkat kemiskinan dan ketimpangan Provinsi DKI Jakarta yaitu :

- Pertumbuhan ekonomi tetap stabil, dimana pada triwulan III 2024 tercatat 4,93% (y-on-y), sedikit meningkat dibandingkan triwulan II (4,9%). Stabilitas ini menjadi faktor penting dalam mendukung penurunan tingkat kemiskinan;
- Tingkat inflasi pada September 2024 sebesar 1,70% (y-on-y), lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya (2,23% pada Juni 2024). Inflasi yang terkendali mendukung daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan;

- c. IHK umum sedikit turun dari 105,08 (Agustus 2024) menjadi 104,97 (September 2024). Namun, penurunan ini tidak signifikan karena IHK makanan, minuman, dan tembakau tetap tinggi di 107,07. Hal ini menunjukkan kebutuhan pokok tetap menjadi tantangan bagi kelompok miskin;
- d. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) triwulan III 2024 sebesar 538,67 (harga berlaku), menurun dibandingkan triwulan II 2024 (578,76);
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta, yang naik menjadi 6,21% pada Agustus 2024 dari 6,03% pada Maret 2024, turut berkontribusi pada kenaikan gini ratio;
- f. Masyarakat rentan miskin di DKI Jakarta selain menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat juga menerima bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- g. Program bantuan dari Pemerintah Pusat antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain sebagainya. Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Program Bantuan Pangan. Program bantuan lain meliputi pemberian insentif untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun sewa sederhana (Rusunawa), dan Pemberian Pelatihan Kerja secara gratis oleh Balai Latihan Kerja, dan lain sebagainya. Seluruh upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan mengurangi bertambahnya penduduk miskin;
- h. Pada September 2024, pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan pencairan Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) pada triwulan III 2024 kepada penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Tingkat Kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain:

No	Kendala	Tindak Lanjut
1	Belum adanya data registrasi sosial ekonomi yang mendata 100% penduduk DKI sebagai dasar pemberian bantuan sosial maupun program perlindungan sosial	1. Berkoordinasi dengan Pusdatinrenbang Bappeda terkait dengan data registrasi sosial ekonomi sebagai dasar data sasaran kemiskinan
2	Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, sulit untuk membedakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat miskin dan non miskin	2. Memberikan pelayanan Kesehatan kepada seluruh masyarakat
3	Tingginya mobilitas penduduk, sehingga menyulitkan petugas untuk mendata dan menetapkan sasaran penduduk miskin	3. Berkoordinasi dengan Dukcapil dan biro pemerintahan terkait terkait data penduduk

Guna memperbaiki Tingkat Kemiskinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2025	Target
1	Meningkatkan ketepatan sasaran PBI JK	Terlaksananya pemadanan data kepesertaan PBI JK	1 Laporan

2.3.2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Tingkat kemiskinan ekstrem saat ini merupakan indikator yang mulai dicantumkan dalam Metadata Indikator TPB/SDGs edisi II (dirilis oleh Bappenas pada September 2020). Indikator tersebut mengukur proporsi penduduk dengan pendapatan (pengukuran di tanah air masih menggunakan proksi pengeluaran).

Berdasarkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2024 sebesar 0,35%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,22 persen poin jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 yang sebesar 0,57%.

Kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023—2026 dan Keputusan Gubernur Nomor 862 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023—2026 :

Tabel II-38 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan Ekstrem	Persen	0,50	0,35	142.86%

Sumber : TKPK Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada tingkat kemiskinan ekstrem pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	1.06	0.57	0.50	0.35	0.83	0.68

Sumber : Bappeda Provinsi Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut dari amanat Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sesuai arahan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI prioritas sasaran intervensi program penghapusan kemiskinan ekstrem perlu difokuskan pada penduduk miskin yang berada pada desil 1, khususnya yang berada di persentil 1—5. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor

580 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Sasaran dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, diperoleh Data Sasaran Prioritas Kemiskinan Ekstrem Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 sebanyak 495.272 individu. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil integrasi DTKS yang dipertajam dengan berbagai basis data lainnya (termasuk Data P3KE).

Berdasarkan hasil pemantauan yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi sepanjang periode triwulan 1 dan 2 tahun 2024, diidentifikasi terdapat 37.302 jiwa penduduk Provinsi DKI Jakarta yang berada pada desil 1 (tingkat kesejahteraan terendah) dan belum mendapatkan intervensi dari pemerintah. Dalam menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan intensif pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta triwulan 3 tahun 2024 yang dilaksanakan pada 21—22 Agustus 2024. Berdasarkan hasil rencana tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, penanggulangan kemiskinan pada triwulan berikutnya difokuskan pada perbaikan tata kelola intervensi dan penanganan penduduk miskin dan rentan desil 1 yang berstatus 0 intervensi program. Upaya tersebut diperkuat melalui Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0041 Tahun 2024 tentang Penanganan Penduduk pada Data Sasaran yang Belum Memperoleh Intervensi Program Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20.091.550.312.153,- (berdasarkan perubahan APBD TA 2024) untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Anggaran tersebut dialokasikan bagi empat kelompok strategi kemiskinan ekstrem sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 32 Tahun 2022.

Strategi pertama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial (di antaranya KJP Plus, KJMU, KAJ, KPDJ, dan KLJ), jaminan sosial (melalui bantuan Jaminan Kesehatan Daerah), subsidi (Subsidi

Pangan Murah, Subsidi Transportasi, Subsidi Rusunawa, Subsidi Air Bersih dan Subsidi Tangki Septik), program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 11,25 triliun, realisasi per triwulan 4 sebesar Rp 10,49 triliun, atau sebesar 93,32% persen dari total anggaran strategi pertama tahun 2024.

Strategi kedua yaitu peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui program dan sub kegiatan yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi dan usaha masyarakat serta pelatihan kerja. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1,87 triliun, realisasi anggaran per triwulan 4 tahun 2024 senilai Rp 1,79 triliun (95,93%). Program pada strategi ketiga ditujukan untuk mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berkaitan erat dengan pemenuhan infrastruktur dasar termasuk hunian layak, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak. Total alokasi anggaran pelaksanaan strategi ketiga sebesar Rp 6,25 triliun dengan realisasi per triwulan 4 tahun 2024 sebesar Rp 5,70 triliun atau sebesar 91,17% dari total alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan strategi tiga di tahun 2024.

Selain ketiga strategi tersebut, terdapat kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berkontribusi pada penghapusan kemiskinan ekstrem, namun berfungsi sebagai katalisator dari berbagai program yang terdapat di strategi lainnya. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp 721,69 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 648,79 miliar atau sebesar 81,90 persen per triwulan 4 tahun 2024

2.4 Indeks Daya Saing Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menguatkan daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi mempunyai indikator Indeks Daya Saing Daerah menjadi Indikator sasaran pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

Salah satu sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan "Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan" adalah

"Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi" dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks ini juga menjadi bagian dari Indikator Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing yang menggambarkan tingkat produktivitas daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pengukuran IDSD dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setiap tahun dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang telah disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data yang ada. Hasil IDSD diarahkan menjadi data yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah.

Sampai dengan awal Februari 2025 ini, BRIN belum merilis IDSD Tahun 2024. Oleh karena itu, capaian yang disajikan dalam laporan ini mengacu pada IDSD Tahun 2023 yang dirilis di Februari 2024. Kerangka pengukuran IDSD 2023 berupa 4 (empat) komponen dasar, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar.

Perangkat komponen pembentuk IDSD 2023



Sumber : BRIN 2024

Target IDSD pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 4,01. Penentuan target ini berdasarkan pertimbangan atas capaian IDSD tahun 2023 sebesar 3,97. Pada saat penyusunan laporan ini, capaian IDSD tahun 2024 belum dapat ditentukan karena realisasi tahun 2024 belum diketahui. Apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target IDSD tahun 2024, maka capaian 2023 sebesar 99%. Untuk memperkirakan pencapaian IDSD pada masa berakhirnya RPD nanti, realisasi tahun 2023 dapat dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 4,03, dimana masih terdapat selisih 0,06 poin.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.96	3.97	4.01	N/A	4.01	40.3

Berdasarkan realisasi IDSD tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2, terdapat 14 provinsi yang mencapai IDSD di atas nilai rata-rata nasional (3,44) dimana skor Provinsi DKI Jakarta merupakan yang tertinggi, disusul oleh Provinsi Bali sebesar 3,85, dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,70



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program dan anggaran guna mendukung peningkatan indeks daya saing daerah tahun 2024 didukung oleh beberapa Perangkat Daerah yaitu :

Tabel II-40
Dukungan Program terhadap IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Indikator	Perangkat Daerah	Program*	Pagu (Rp)	Realisasi** (Rp)	Serapan (%)
Indeks Daya Saing Daerah	Bappeda	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.616.950.454	7.284.922.100	95,64
	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	13.373.732.589	12.665.723.965	94,71
		Program Pengelolaan Permuseuman	61.189.878.800	58.459.851.019	95,54
		Program Pengembangan Kebudayaan	117.715.007.792	104.004.096.092	88,35
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	81.752.409.742	81.680.048.868	99,91
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	2.390.606.032	2.276.750.100	95,24
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.794.386.163	2.575.682.398	92,17
		Program Promosi Penanaman Modal	8.723.336.557	7.995.671.845	91,66
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	890.107.782	885.681.919	99,50
		Program Pembinaan Perpustakaan	101.982.713.647	99.355.089.311	97,42
	Kabupaten Administrasi Kep Seribu	Program Pembinaan Perpustakaan	1.479.336.296	1.423.620.845	96,23
	TOTAL		399.908.465.854	378.607.138.462	94,67

* : Program pendukung diperoleh dari Cascading Tree pada sistem e-Monev

** : Pagu dan Realisasi Anggaran diperoleh dari data tarikan e-Monev triwulan IV tahun 2024

Sumber : LKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tabel menunjukkan bahwa terdapat 11 (sebelas) program dari 6 (enam) Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian IDSD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024, dengan total pagu anggaran lebih dari 399 Milyar Rupiah.

Perbandingan capaian IDSD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pilar pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Gambar 3. Skor IDSD DKI Jakarta mencapai 4,01 pada tahun 2022 atau sebanyak 0.75 poin di atas nilai rata-rata nasional. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2023, skor Jakarta menurun sebanyak 0,04 poin sedangkan nilai rata-rata nasional naik 0,18 poin. Salah satu faktor penurunan IDSD Jakarta tahun 2023 adalah adanya penyempurnaan beberapa indikator secara signifikan agar kompatibilitasnya dengan GCI semakin baik.

Selain faktor penyempurnaan indikator, penilaian tahun 2023 menggunakan skor min-max sebagai tolok ukur nilai terbaik dan terendah sehingga fluktuasi nilai nasional berdampak pada skor IDSD suatu daerah. Berdasarkan pengukuran oleh BRIN, nilai beberapa indikator dari daerah lain mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai yang diperoleh Jakarta tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan sehingga skor beberapa indikator di Jakarta menurun. Penurunan nilai IDSD Jakarta pada tahun 2023 terdapat pada 4 (empat) pilar, yaitu Pilar 3 Adopsi TIK, Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro, Pilar 11 Dinamisme Bisnis, dan Pilar 12 Kapabilitas Inovasi. Penurunan pada Pilar 3, Pilar 4, dan Pilar 11 dikarenakan adanya penyempurnaan indikator, namun penurunan pada pilar 12 bukan disebabkan oleh penyempurnaan indikator.



Sumber :Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan capaian IDSD pada tahun mendatang dengan melaksanakan rencana aksi pada pilar yang mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

- a. Pengembangan Ekosistem dan Komunitas Riset dan Inovasi di Wilayah DKI Jakarta (*Jakarta Research and Innovation Ecosystem*)
- b. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi melalui Kegiatan Jakarta *Innovation Days* dan *Innovative Government Awards*
- c. Memperkuat kolaborasi pelaksanaan riset dengan melibatkan akademisi dan lembaga riset pemerintah

3. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani Yang Berkesetaraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tujuan ketiga ini yaitu ‘Pembangunan Manusia’, ‘Madani’, dan ‘Berkesetaraan’. Pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan yang terpenting yang dapat menentukan kualitas hidup warga Jakarta. Kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu ‘Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat’ dan ‘Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan’.

Adapun terkait standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada tujuan ketiga ini. Selanjutnya kata kunci madani merupakan penerjemahan dari konsep civil society yang bermakna sebuah tatanan masyarakat modern yang demokratis dalam berinteraksi di dunia yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban. Untuk itu dirumuskan sasaran ‘Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat’. Kata kunci terakhir yaitu berkesetaraan merupakan suatu kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran ‘Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender’.

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu :

Tabel II-41
Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,55	84,15	100,72%
Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,16	12,5	102.80%
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,81	75,99	100,24%
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	13,2	N/A (belum rilis)	-
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,14	N/A (Belum rilis)	-
Menguatnya nilai nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	82,13	84,57	102.97%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Predikat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tujuan dari Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, pada Tahun 2024 mempunyai target nilai/predikat IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu 83.55 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). IPM diterbitkan oleh BPS dengan rumus perhitungan: $IPM = \sqrt{(I \text{ kesehatan}) \times (I \text{ pendidikan}) \times (I \text{ pengeluaran})} \times 100$. Capaian

IPM dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah (IPM < 60), Sedang (60 = IPM < 70), Tinggi (70 = IPM < 80), dan Sangat tinggi (IPM = 80).

Realisasi Capaian indeks IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian sebesar 84,15 tumbuh sebesar 0,6 poin atau 0,72 persen berdasarkan Katalog: 4102002.31 ISSN : 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 6,2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tanggal 27 Desember 2024.

Tabel II-42
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,55	84,15	100,72%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Daya Saing Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,55	83,55	81,77 (RPD)	84,15	81,99 (RPD)	82,11 (RPD)
					83,55 (Kep.Gub Perkin 2024)		84,15	84,15

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

(Katalog: 4102002.31 ISSN 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 6,2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tanggal 27 Desember 2024)

Nilai Komponen Pembentukan IPM yaitu :

No	Komponen		
1	Umur Harapan Hidup	75,99	Tahun
2	Rata – rata Lama Sekolah	11,49	Tahun
3	Harapan Lama Sekolah	13,51	Tahun
4	Pengukuran per Kapita (PPP)	Rp. 19,95 juta	
	Nilai IPM	84,15	

Selama kurun waktu 2020–2024, IPM DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 81,92 dan meningkat 2,23 poin menjadi 84,15 pada tahun 2024 atau tumbuh 2,72 persen selama 5 tahun terakhir. Jika kita lihat, selama kurun waktu 2020–2024 pertumbuhan IPM DKI Jakarta mengalami peningkatan. Pertumbuhan IPM pada tahun 2024 sebesar 0,72 persen. Penguatan ini didukung oleh pertumbuhan semua komponen pembentuknya yakni UHH, HLS RLS dan PPP:

- a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 75,99 tahun,
- b. Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,51 tahun,
- c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 11,49 tahun
- d. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Rp.19,95 juta,

Sehubungan dengan capaian nilai IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari : Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	9.679.779.777.502	8.851.223.826.167	91,44%
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.848.735.747.202	2.752.804.914.427	96,63%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.574.265.029.299	1.527.091.732.070	97,00%

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	275.968.307	258.483.000	93,66%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	528.938.455	514.743.000	97,32%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.422.070.204.223	6.120.613.478.921	95,31%
	TOTAL		20.525.655.664.988	19.252.507.177.585	93,8 %

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai IPM tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp. 19.252.507.177.585,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 20.525.655.664.988,- atau capaian sebesar 93.8 % dengan capaian efisiensi sebesar 6.2 % dari nilai total anggaran.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagai berikut :

- a. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan (SUB KSD : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang Satuan Pendidikan dengan beberapa renaksi yaitu:
 - 1) Pengembangan Potensi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 2) Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu
 - 3) Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Dana KJP Plus

- 4) Pemenuhan Kewajiban Pengembang untuk Sarana dan/atau Prasarana Pendidikan
 - 5) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 6) Peningkatan Keterserapan Tamatan SMK (BMW: Bekerja, Melanjutkan, dan Wirausaha)
 - 7) Peningkatan Jumlah Pendidik Profesional di Semua Jenjang
 - 8) Pelaksanaan program Jakarta Sekolah Komunitas.
- b. KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang memiliki 1 (satu) rencana aksi yaitu Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat. Seluruh sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026.
- c. KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:
- 1) Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas.
 - 2) Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- d. KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting, yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:
- 1) Regulasi terkait penetapan data balita.
 - 2) Mengusulkan, menyusun, mendistribusikan bahan renaksi penurunan stunting.
- e. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi, yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:
- 1) Penyediaan Materi terkait SubKSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi.
 - 2) Penyediaan Kantin Sehat Percontohan di Fasilitas Kesehatan.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Berikut capaian Nilai/Predikat IPM seluruh Pemda tahun 2024 oleh *(Katalog: 4102002.31 ISSN 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 6,2024 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tanggal 27 Desember 2024).*

Tabel II-43
10 Pemerintah Daerah nilai capaian IPM

No	Pemda	Nilai
1	DKI Jakarta	84,15
2	D.I. Yogyakarta	81,62
3	Kepulauan Riau	79,89
4	Kalimantan Timur	78,79
5	Bali	78,63
6	Sumatera Barat	76,43
7	Banten	76,35
8	Sumatera Utara	75,76
9	Sulawesi Utara	75,68
10	Riau	75,67

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
1	Angka Harapan Hidup	
a.	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	a. Akreditasi pada 82 Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Pengembangan 5 (Lima) layanan unggulan dan jejaring layanan rujukan pada RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta yang meliputi kanker, jantung, stroke, uronefrologi (ginjal), dan Kesehatan ibu dan anak (KIA).
b.	Kemudahan akses penduduk untuk menjangkau layanan Kesehatan	Tersedianya 31 RSUD/RSKD (Rumah Sehat untuk Jakarta) di 28 kecamatan, 44 Puskesmas (setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas), 292 Puskesmas Pembantu yang tersebar pada 240 kelurahan, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah.

No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
c.	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	a. Implementasi hospitality dalam pelayanan. b. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM Kesehatan dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan. c. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan.
d.	Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah	Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan status <i>universal health coverage</i> (UHC) dengan cakupan 98,34%. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan Daerah diantaranya: 1. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari program JKN: a. Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI. b. Iuran bagi peserta bukan PBI dengan kategori penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. c. Iuran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai non PNS pada BLUD Bidang Kesehatan. d. Bantuan iuran 2. Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari luar program JKN a. Pelayanan ambulans gawat darurat. b. Pelayanan pemeriksaan <i>Nucleic Acid Test</i> (NAT) darah oleh Palang Merah Indonesia. c. Pemeriksaan kesehatan. d. Pelayanan pengobatan korban kekerasan. e. Pelayanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. f. Pelayanan kesehatan pada kejadian luar biasa. Pelayanan kesehatan pada kejadian bencana.
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	a. kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program untuk memperluas akses pendidikan dengan memberikan bantuan sosial biaya pendidikan kepada seluruh peserta didik yang tidak mampu baik yang bersekolah di satuan pendidikan negeri maupun swasta melalui KJP Plus. Selain KJP Plus Pemprov DKI juga memberikan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) bagi peserta didik yang tidak mampu dan bersekolah di satuan pendidikan swasta. b. Untuk perluasan akses pendidikan dengan meningkatkan daya tampung melalui pelaksanaan PPDB Bersama yang melibatkan satuan pendidikan swasta pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. c. Bantuan sosial pendidikan diperluas dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar masyarakat dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kedua program tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi anak untuk bersekolah, khususnya dari keluarga yang tidak mampu.

No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
		d. Mendorong ketersediaan guru di semua satuan jenjang pendidikan negeri dan memberikan tambahan penghasilan bagi guru-guru di sekolah swasta menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. e. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi dan penambahan gedung sekolah terus dilakukan; selain itu untuk menjamin aksesibilitas ke sekolah telah disediakan moda transportasi dan bus sekolah sekolah gratis
3	Pengeluaran per Kapita (PPP)	Pemerintah untuk terus mendorong roda perekonomian dan memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat tidak mampu. Berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya Jakpreneur yang merupakan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) untuk menjaga daya beli pekerja Jakarta. Namun demikian, secara nilai absolut, capaian PPP Provinsi DKI Jakarta jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian PPP nasional. PPP Indonesia pada tahun 2020 sebesar 11,01 juta rupiah, meningkat menjadi 12,34 juta rupiah pada tahun 2024. Selama periode tahun 2020-2024 terjadi pertumbuhan PPP Indonesia sebesar 12,06 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PPP Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,47 persen pada periode yang sama.

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Guna memperbaiki nilai/predikat IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2024	Keterangan
1	- Pemberian bantuan KJP PLUS - Pemberian bantuan BPMS - Penyelenggaraan PPDB Bersama yang melibatkan sekolah swasta	Membentuk tim penanganan anak putus sekolah (ATS) yang melibatkan lintas sektor	
2	Sinkronisasi dan integrasi data dasar penduduk untuk sasaran pelaksanaan program kesehatan	Menyusun kegiatan strategis daerah terkait integrasi data dasar penduduk	

3.2 Indeks Dimensi Pendidikan

Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun, Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu

- Harapan Lama Sekolah dan
- Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.

Tabel II-44 Capaian Indikator Indeks Dimensi Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Real 2024	Capaian
Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,16	12,50	102,80%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Indeks Indikator Kinerja (Tujuan) Harapan Lama Sekolah/HLS yang memiliki sasaran Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran serta Indikator Kinerja (Sasaran) Rata-rata Lama Sekolah/RLS dengan sasaran Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan.

Realisasi Capaian nilai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian atas Indikator Kinerja (Tujuan) Harapan Lama Sekolah/HLS yang memiliki sasaran Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran serta Indikator Kinerja (Sasaran) Rata-rata Lama Sekolah/RLS dengan sasaran Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,51	101,20%
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,49	100,09%

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Sasaran Indikator kinerja utama pada Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-45
Perbandingan realisasi dengan target RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12.14	12.39	12,16	12,50	12.18	12.20

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan target pada tabel diatas Harapan Lama Sekolah (HLS) target pada tahun 2026 sebesar 13,15. Capaian HLS Tahun 2024 sebesar 13,51 lebih tinggi dari target tahun 2026 yaitu selisih 0.36, sehingga perlu ditingkatkan kembali target untuk tahun 2025 s.d 2026. Sedangkan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) target pada tahun 2026 sebesar 11,25 dengan capaian tahun 2024 sebesar 11,49 lebih tinggi dari target tahun 2026 yaitu selisih 0.24, sehingga perlu ditingkatkan kembali target untuk tahun 2025 s.d 2026.

Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2024 Sebagai berikut :

No	Pemda	HLS	RLS
1.	Pemerintah Provinsi DIY	15,70	9,92
3.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,51	11,49
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	13,43	8,28
5.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12,86	8,02
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	12,80	8,87
6.	Nasional	13,21	8,85

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Guna meningkatkan capaian IKU indeks dimensi pendidikan terdapat beberapa program yang mendukung diantaranya adalah :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks dimensi pendidikan	Dinas Pendidikan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8.101.051.975.865	7.878.055.605.789	97,25%
	Dinas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	9.679.779.777.502	8.851.223.167	91,44%
	Jumlah		17.780.831.753.367	16.729.279.431.956	94,09%

Adapun salah satu kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang perlu penanganan lintas sektor karena terdapat beberapa penyebab yang memang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan. Adapun upaya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 antara lain :

- a. Pemberian bantuan KJP PLUS
- b. Pemberian bantuan BPMS
- c. Penyelenggaraan PPDB Bersama yang melibatkan sekolah swasta

Guna meningkatkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mempunyai rencana aksi untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan membentuk Tim Penanganan Anak Putus Sekolah (ATS) yang melibatkan lintas sektor.

3.3 Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup merupakan sasaran dari Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 mempunyai target Angka Harapan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu 75,81 Tahun yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan memiliki indikator kinerja utama sasaran angka harapan hidup pada tahun 2023 dengan target sebesar 73,21. Dimana pada tahun 2024 ini Realisasi Capaian nilai Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 mempunyai nilai Capaian sebesar 75,99 Tahun berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Tabel II-46
Capaian Indikator Angka Harapan Hidup

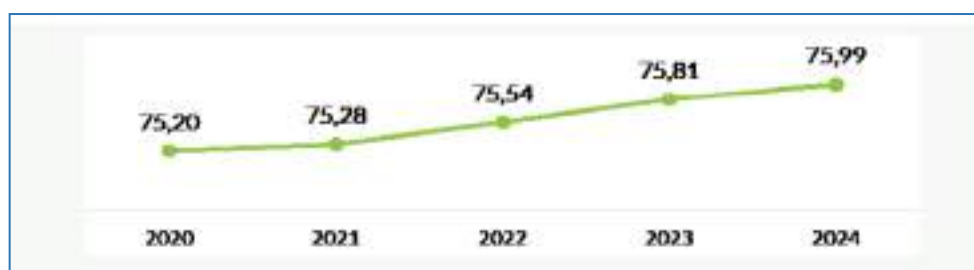
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,81	75,99	100,24%

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa target dari sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan” dengan indikator “Angka Harapan Hidup” telah tercapai. AHH DKI Jakarta Tahun 2024 yang telah mencapai 75,99 tahun mengartikan bahwa bayi yang dilahirkan tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup sampai berumur hampir 76 tahun.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada 2020, UHH DKI Jakarta adalah 75,20 tahun dan pada 2024 mencapai 75,99 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,18 tahun atau 0,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 yang sebesar 0,27 persen per tahun.

Gambar II-7
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) DKI Jakarta (tahun), 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Adapun pembagian angka harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta ke masing-masing wilayah:

Tabel II-47 Pembagian perkota di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir (tahun)		
	2022	2023	2024
Kabupaten Kepulauan Seribu	75,54	74,89	75,03
Kota Jakarta Selatan	75,77	76,02	76,23
Kota Jakarta Timur	75,12	75,37	75,59
Kota Jakarta Pusat	76,07	76,34	76,57
Kota Jakarta Barat	75,62	75,81	75,98
Kota Jakarta Utara	74,96	75,07	75,17
DKI JAKARTA	75,54	75,81	75,99

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Indikator kinerja utama pada Angka Harapan Hidup pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023		2024		Target	
			Target	Real	Target	Real	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.21	75.81	75,81	75,99	73.42	73.53

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas, Indikator Angka Harapan Hidup pada target akhir di 2026 memiliki target 73,53 tahun. Capaian tahun 2024 sebesar 75,99 telah melampaui target tersebut. Sehubungan dengan capaian Angka Harapan Hidup ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.422.070.204.223	6.120.613.478.921	95,31%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.848.735.747.202	2.752.804.914.427	96,63%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.574.265.029.299	1.527.091.732.070	97,00%
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	275.968.307	258.483.000	93,66%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	528.938.455	514.743.000	97,32%
		TOTAL	10.845.875.887.486	10.401.283.351.418	95,90%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Terkait realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Angka Harapan Hidup di Dinas Kesehatan secara keseluruhan mencapai realisasi sebesar Rp. 10.401.283.351.418 atau mencapai 95,90%.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung ketercapaian indikator tersebut diantaranya:

1. KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:
 - a. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
 - b. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
2. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi yang memiliki 2 rencana aksi yaitu:
 - a. Penyediaan Materi terkait SubKSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terintegrasi.
 - b. Penyediaan Kantin Sehat Percontohan di Fasilitas Kesehatan.

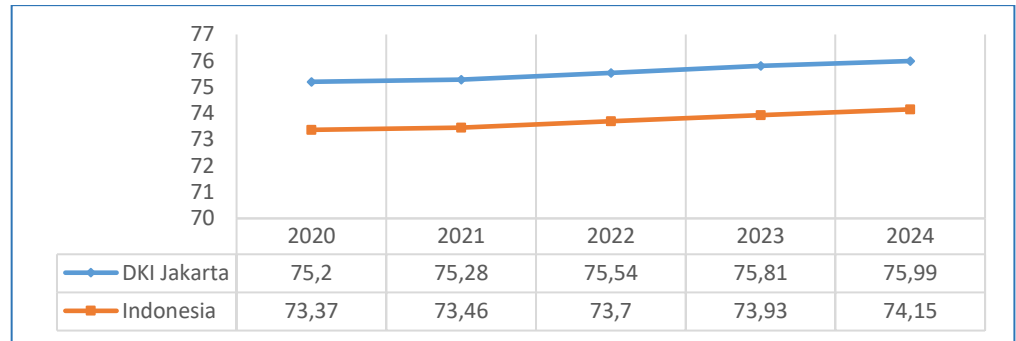
Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target dengan capaian 100% guna meningkatkan Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Adapun beberapa renaksi diatas telah mencakup beberapa penggunaan sumber daya guna meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

Umur harapan hidup bayi yang lahir pada 2024 sebesar 75,99 tahun, meningkat 0,18 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Berikut capaian Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta melalui <https://jakarta.bps.go.id>

Gambar II-8
Capaian Angka Harapan Hidup



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024)

Selama periode Tahun 2020-2024, AHH Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan total pertumbuhan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 sebesar 0,79 Tahun. AHH Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan total pertumbuhan dari Tahun 2020 ke Tahun 2024 sebesar 0,78 Tahun. Hal ini menunjukkan level capaian dan pertumbuhan AHH Provinsi DKI Jakarta masih berada di atas capaian nasional.

Adapun beberapa kendala yang ada dalam capaian Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 antara lain :

No	Faktor Keberhasilan	Tindak Lanjut
1	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	- Akreditasi pada 82 Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. - Pengembangan 5 (Lima) layanan unggulan dan jejaring layanan rujukan pada RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta yang meliputi kanker, jantung, stroke, uronefrologi (ginjal), dan Kesehatan ibu dan anak (KIA).
2	Kemudahan akses penduduk untuk menjangkau layanan kesehatan	Tersedianya 31 RSUD/RSKD (Rumah Sehat untuk Jakarta) di 28 kecamatan, 44 Puskesmas (setiap kecamatan memiliki 1 puskesmas), 292 Puskesmas Pembantu yang tersebar pada 240 kelurahan, dan 1 Laboratorium Kesehatan Daerah.
3	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	- Implementasi hospitality dalam pelayanan. - Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDMK dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan. - Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai Standar di Puskesmas Kecamatan.

No	Faktor Keberhasilan	Tindak Lanjut
4	Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah	Oleh Dinas Kesehatan - Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari program JKN: - Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI. - Iuran bagi peserta bukan PBI dengan kategori penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. - Iuran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai non PNS pada BLUD Bidang Kesehatan. - Bantuan iuran - Pemberian manfaat Jaminan Kesehatan bersumber dari luar program JKN - Pelayanan ambulans gawat darurat. - Pelayanan pemeriksaan <i>Nucleic Acid Test</i> (NAT) darah oleh Palang Merah Indonesia. - Pemeriksaan kesehatan. - Pelayanan pengobatan korban kekerasan. - Pelayanan visum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Pelayanan kesehatan pada kejadian luar biasa. - Pelayanan kesehatan pada kejadian bencana.

Rencana Kedepan terkait dengan Target kedepan

Guna memperbaiki Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

Kegiatan	Rencana Aksi 2025	Target
Peningkatan Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan yang Holistik, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Meningkatkan Keberhasilan Rujukan melalui Aplikasi Jakconnected	Tersedianya strategi rujukan berbasis kompetensi
		Terlaksananya JAKConnected

3.4 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Gizi merupakan salah satu aspek kunci bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan bangsa. Salah satu masalah gizi yang signifikan dan menjadi fokus dunia adalah stunting pada balita. UNICEF/WHO/World Bank mengestimasi prevalensi balita stunting di seluruh dunia sebesar 22,3% atau sebanyak 148,1 juta jiwa pada 2022. Lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia (76,6 juta) dan sekitar 30% (63,1 juta) berasal dari Afrika (UNICEF/WHO/World Bank Group – Joint Child Malnutrition Estimates 2023 edition).